



p-ISSN : 2963-6477

e-ISSN : 2964-7126

VOLUME : 2

NOMOR : 1

HALAMAN : 01 - 109

JUNI 2023

Saraswati

JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG



**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

SARASWATI

JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG

Volume : 2	Nomor : 1	Halaman : 01 - 109	Juni 2023
------------	-----------	--------------------	-----------



BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali
<https://balitbang.bulelengkab.go.id>
Email: balitbang@bulelengkab.go.id
<https://ejurnal.bulelengkab.go.id>

p-ISSN : 2963 - 6477
e-ISSN : 2964 - 7126

TIM REDAKSI
JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

Pengarah	: Penjabat Bupati Buleleng
Penanggungjawab	: Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Pemimpin Redaktur	: Sekretaris Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng
Wakil Redaktur	: Drs. Made Roy Astika, A.Md.
Penyunting/Editor	: Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H, M.Fil.H. (STAHN Mpu Kuturan) Kadek Hengki Primayana, SE, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan) Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Inovda Buleleng Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbang Inovda Buleleng Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balitbang Inovda Buleleng
Desain Grafis	: I Nengah Juliawan, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja). Nyoman Maruta Gautama Putra, S.Ds., M.Sn. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).
Sekretariat	: I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom.M.Kom. I Gede Suardika, SE.M.Pd. Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H.
Pembuat Artikel	: Analis Kebijakan Ahli Muda Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng
Mitra Bestari	: Prof. Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja) I Ketut Suparya, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja) Ni Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ST. M.Kom. (Universitas Panji Sakti Singaraja)

PENGANTAR
KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

Om Suastyastu,



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya Jurnal Kelitbangan Buleleng bisa diterbitkan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah direncanakan.

Jurnal Kelitbangan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini, diberi nama "SARASWATI", merupakan publikasi hasil-hasil kajian ilmiah kelitbangan di Kabupaten Buleleng atas kerjasama dengan Perguruan Tinggi ternama di daerah ini.

Sebagai salah satu Jurnal Ilmiah, Jurnal Kelitbangan Buleleng ini diharapkan akan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah Buleleng, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kami sangat menyadari masih banyak adanya kekurangan dalam penyusunan Jurnal ini, baik dari penulisan, format, dan juga tampilan, sehingga dengan kerendahan hati kami mohon masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan penerbitan edisi mendatang.

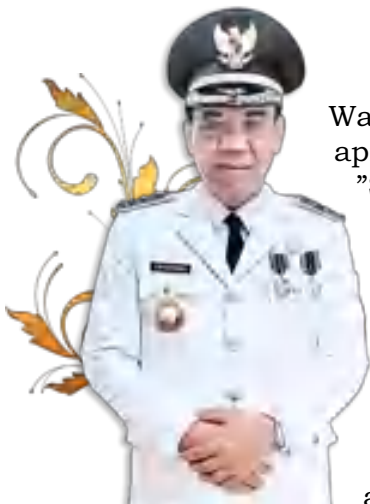
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Om Santhi, Santhi Santhi Om



SAMBUTAN PENJABAT BUPATI BULELENG

Om Suastyastu,



Atas Asung Kertha Waranugraha Ida Hyang Widhi Wasa, saya menyambut dengan penuh rasa syukur, dan apresiasi berkenaan dengan penerbitan Jurnal "SARASWATI, JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG". Saya menilai bahwa Jurnal Kelitbangan Buleleng ini, merupakan bagian dari sebuah inovasi yang dilakukan oleh Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng dalam rangka desiminasi dan sosialisasi hasil-hasil kelitbangan Kabupaten Buleleng kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa untuk dapat mewujudkan keberhasilan program pembangunan, perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan dan langkah tentang hasil kelitbangan, antara pemerintah (organisasi perangkat daerah) dan masyarakat, sehingga kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dan sejalan dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya.

Kajian dan penelitian ilmiah ini sangatlah penting bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pembuatan kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan untuk mengatasi dan menjawab semua tantangan dan permasalahan pembangunan.

Oleh karena itu dengan terbitnya Jurnal kelitbangan ini, saya sangat berharap akan memberikan persepsi sama untuk memandang kedepan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Buleleng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng.

Selain itu kehadiran Jurnal ini kiranya akan memberi warna yang positif terhadap peningkatan hasil kajian/penelitian di Kabupaten Buleleng, minimal mampu memberi informasi ilmiah tentang hasil-hasil kelitbangan.

Harapan saya "JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG" dikelola secara sungguh-sungguh dan professional sehingga menjadi sumber informasi kebijakan yang jelas bagi masyarakat.

Akhirnya saya sampaikan selamat atas penerbitan Jurnal "SARASWATI, JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG", semoga sukses.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om



CATATAN REDAKSI

Saraswati, Jurnal Kelitbangan Buleleng, pada penerbitan Volume 2 Nomor 1 disajikan tulisan dari hasil kajian yang telah dilaksanakan yaitu (1). Kajian Pengembangan Model Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* Pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng, bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha, (2). Analisis Potensi Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tejakula dan Banjar Kabupaten Buleleng, bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha, (3Singaraja). Analisis Digitalisasi Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Buleleng, bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, (4). Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan, bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, (5). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bekerjasama dengan Universitas Panji Sakti Singaraja, dan (6). Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Buleleng, bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Akhir kata, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya kepada kajian yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

TIM REDAKSI	ii
PENGANTAR KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG	iii
SAMBUTAN BUPATI BULELENG	iv
CATATAN REDAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
PENGEMBANGAN MODEL DESA AGROWISATA BERBASIS TRI HITA KARANA PADA DESA SAMBANGAN DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BULELENG	1
ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TEJAKULA DAN BANJAR KABUPATEN BULELEG.....	19
ANALISIS DIGITALISASI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN BULELENG	29
MEREKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULELENG MENUJU DIGITALISASI SATUAN PENDIDIKAN	41
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIK (P4GN) DAN PREKUSOR NARKOTIKA	56
PENGUATAN SISTIM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BULELENG	78

KAJIAN PENGEMBANGAN MODEL DESA AGROWISATA BERBASIS TRI HITA KARANA PADA DESA SAMBANGAN DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BULELENG

**Ida Bagus Gede Paramita¹, Ketut Arsudipta²,
Ni Made Ary Widiastini³, Sukadi⁴**

**Pariwisata Budaya Hindu, STAH Negeri Mpu Kuturan
Singaraja¹, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Balitbang Inovda²,
Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan, Universitas
Pendidikan Ganesha³, Program Studi Hukum dan
Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha⁴**

Email: ary.widiastini@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis potensi serta mengembangkan model agrowisata yang memungkinkan untuk diimplementasikan di Desa Sambangan dan wilayah sekitarnya. Observasi lapangan dan wawancara dilakukan pada tahap pertama penelitian untuk memetakan potensi yang tersedia. Selanjutnya, uji lapangan dilakukan dengan mencoba jalur wisata yang disusun secara langsung. Unsur desa dinas, desa adat, dan pengelola wisata pada tiga desa yakni Desa Sambangan, Desa Panji dan Desa Baktiseraga menjadi subjek penting dalam penelitian ini. Selain wawancara langsung di desa tempat kegiatan penelitian dilaksanakan, kegiatan Kelompok Diskusi Terpumpun (KDT) juga dilakukan untuk mendapat masukan serta validasi data yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng serta SKPD terkait. Hasil kajian penelitian ini menghasilkan dua rekomendasi tentang model pengembangan desa agrowisata di desa Sambangan dan daerah sekitarnya yaitu agrosubak dan agroventure. Disamping itu, untuk mengoptimalisasi pengembangan pariwisata berkonsep agro dan berbasis *Tri Hita Karana* maka diperlukan studi lanjutan tentang kelayakan yang dilanjutkan dengan penyusunan *detail engineering design* (DED).

Kata Kunci: *Agrowisata, Tri Hita Karana, Pengembangan.*

Abstract

This study aims to map the potential, analyze the potential and develop an agro-tourism model that allows it to be implemented in Sambangan Village and its surroundings. Field observations and interviews were conducted in the first phase of the research to map the available potential. Furthermore, the field test was carried out by trying the tourist routes that were arranged directly. Elements of government villages, traditional villages, and tourism managers in three villages namely Sambangan Village, Panji Village, and Baktiseraga Village are important subjects in this study. In addition to direct interviews in the village where the research activity was carried out, the Focus Group Discussion (FGD) activity was also carried out to obtain input and data validation which was carried out by involving the Balitbang Buleleng Regency and related Regional Work Units (SKPD). Through research activities carried out for three months, two models can be recommended, namely (1) Agrosubak in Sambangan Village and its Surroundings; (2) Agroventure of Sambangan Village and Surrounding Areas. In this study, it is also recommended that optimizing the development of agro-concept tourism and based on Tri Hita Karana, it is necessary to carry out further studies, namely a Feasibility Study which then prepares a DED (detailed engineering design).

Keywords: Agrotourism, Tri Hita Karana, Development.

PENDAHULUAN

Ekowisata, agrowisata, wisata pedesaan adalah bentuk-bentuk pariwisata yang muncul pada abad terakhir, menjadi semakin penting sektor industri pariwisata di seluruh dunia (Maria-Irina Ana, 2017). Agrowisata dipandang sebagai sarana lokal atau regional untuk mengamankan pendapatan pelengkap bagi keluarga pedesaan, meningkatkan standar hidup mereka dan mempertahankan penduduk pedesaan. Selain itu dilihat sebagai kegiatan lokal atau regional yang bertujuan untuk merevitalisasi lingkungan pedesaan dan mengurangi pengangguran serta kegiatan yang mampu menawarkan solusi alternatif untuk masalah sosial dan ekonomi besar yang dihadapi daerah pedesaan yang tidak menguntungkan yang sumber dayanya terutama terikat di sektor utama ekonomi (Lakovidou, 1991). Agrotourism secara umum bercirikan (1) kegiatan pariwisata yang dilakukan di daerah non-perkotaan oleh individu yang pekerjaan utamanya adalah di sektor primer atau sekunder ekonomi, (2) kegiatan wisata berskala kecil, keluarga atau koperasi yang asalnya, sedang dikembangkan di daerah pedesaan oleh orang-orang yang bekerja di pertanian.

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini sedang menggalakkan pembangunan desa, salah satunya adalah dengan mendorong Desa Sambangan dan sekitarnya sebagai desa agrowisata berbasis kearifan lokal (agrowisata, badan usaha milik desa, panorama alam, hutan desa, makanan tradisional dan kesenian tradisional). Desa Agrowisata adalah

desa yang berupaya mengembangkan sumber daya alam suatu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian untuk dijadikan kawasan wisata. Potensi yang terkandung tersebut harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis produk atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sarana dan prasarananya (Sumarwoto, 1990; Arka, I. W., 2016). Kemudian batasan mengenai agrowisata dinyatakan bahwa agrowisata adalah suatu jenis pariwisata yang khusus menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan hutan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pengembangan agrowisata pada hakekatnya merupakan upaya terhadap pemanfaatan potensi atraksi wisata pertanian. Berdasarkan surat keputusan (SK) bersama para antara Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Pertanian No. KM.47/PW.DOW/MPPT-89 dan No.204/KPTS/HK050/4/1989 agrowisata sebagai objek wisata, diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata diberi batasan sebagai wisata yang memanfaatkan objek-objek pertanian dalam arti luas (Arida, I. N. S., & Pujani, L. K. 2017; Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M., 2017).

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan amanat tersebut tampak jelas bahwa pelaksanaan pembangunan desa sesungguhnya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh berbagai aspek yang relevan dengan sasaran dan tujuan pembangunan itu sendiri atau dengan pendekatan yang terintegrasi. Oleh karena itu, keterkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya harus menjadi fokus pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan ekonomi desa tidak hanya terkait dengan pemetaan potensi/kapasitas ekonomi desa, dan jaringan pasar, melainkan juga berkaitan dengan pembangunan aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa, penataan administrasi pemerintah desa, serta memiliki keterkaitan dengan pembangunan perkotaan. Sedangkan tujuan dari pengembangan Desa Agrowisata adalah (1) meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat, (2) mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk mendorong tumbuhnya Usaha Perekonomian Masyarakat Desa secara Keseluruhan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, (3) menciptakan Lapangan Kerja, Penyediaan dan jaminan Sosial, (4) melestarikan tradisi, nilai-nilai, adat, budaya dan alam masyarakat pedesaan, dan (5) membangun inisiasi, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam

mengelola dan mengembangkan desanya masing-masing (Dewi, M. H. U., 2013; Fauzy dan Putra. (2015; Suastika I. N., 2017).

Pengembangan Desa Agrowisata ini mesti didasarkan pada nilai-nilai dan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Demikian juga dengan pemilihan Desa Sambangan dan sekitarnya sebagai pengembangan Desa Agrowisata didasarkan pada masalah (hambatan dan tantangan) dan potensi (peluang dan harapan) yang ada di Desa Sambangan (Andriyani, A. A. I., 2017). Fungsi agrowisata (Ahmadi, 2017) dapat dijalankan melalui fungsi budidaya pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan serta fungsi konservasi, dalam bentuk pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, keseimbangan antara konsumsi dan produksi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemberantasan kemiskinan yang mana program-program yang ditawarkan pemerintah sebaiknya tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat petani yang sebagian besar masih tergolong miskin. Berdasarkan ruang lingkup dan potensi daya tariknya (Ahmadi, 2017), kita mengenal ada beberapa jenis agrowisata yaitu agrowisata tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Masing-masing jenis agrowisata tersebut memiliki karakter yang berbeda sehingga memerlukan pengelolaan yang berbeda pula. Penyajian produk/komoditas agrowisata harus dikemas dengan baik agar wisatawan merasa puas menikmatinya.

Berdasarkan studi pendahuluan ini, ditemukan adanya keinginan desa yang menjadi kajian telah menuangkan kebutuhannya yang sejalan dengan pengembangan pariwisata berkonsepkan agrowisata melalui RJPM Desa, yakni sesuai dengan fokus utama kajian adalah Desa Sambangan, Desa Panji dan Desa Baktiseraga.

Secara umum permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah cara mengembangkan Desa Sambangan sebagai Desa Agrowisata dengan maksud mewujudkan Pengembangan Model Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* pada Desa Sambangan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah menganalisis dan mengembangkan Desa Sambangan sebagai Desa Agrowisata, dan secara khusus: (1) Identifikasi kembali SWOT atas potensi terkini pada Desa Sambangan dan sekitarnya untuk dapat dikembangkan sebagai Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* (THK) di Kabupaten Buleleng, (2) Analisa strategi SWOT Desa Sambangan dan sekitarnya untuk dapat dikembangkan sebagai Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* (THK) di Kabupaten Buleleng, (3) Model Desa Sambangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* (THK) di Kabupaten Buleleng.

METODOLOGI

Lokasi penelitian tentang kajian pengembangan model desa agrowisata berbasis *Tri Hita Karana* untuk Desa Sambangan dan Sekitarnya dilakukan di Desa Sambangan dan dua desa penyangga lainnya yakni Desa Panji dan Desa Baktiseraga, Kabupaten Buleleng. Waktu kegiatan penelitian selama tiga bulan yakni dari bulan Mei

sampai dengan Agustus tahun 2022. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif sebagai pelengkap Data kualitatif berupa uraian atau pernyataan dan data kuantitatif berupa angka- angka. Menurut (Sudarso, 2006) sumber data dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti; (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan informan dan FGD. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku-buku yang menunjang kajian ini. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis SWOT serta matriks EFAS dan IFAS. Hasil analisis data penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan dipaparkan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

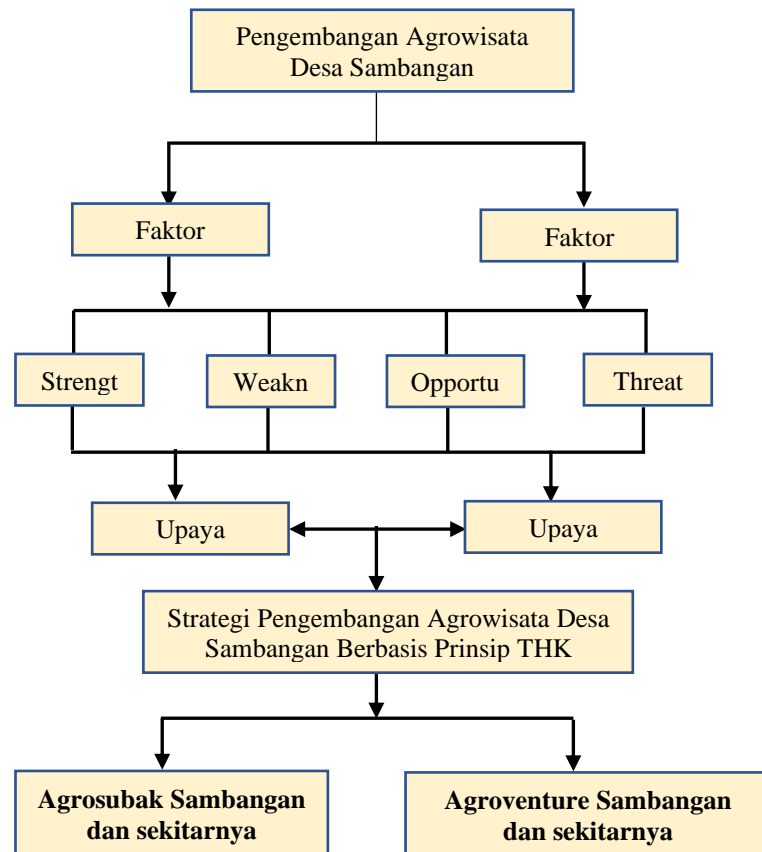
a. Analisa SWOT untuk pengembangan Desa Sambangan dan sekitarnya sebagai Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* (THK)

Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Buleleng memiliki potensi yang cukup besar tak hanya dari sektor pertanian juga pariwisata. Bahkan Desa Sambangan kini menjadi salah satu objek wisata cukup terkenal di Bali Utara. Sejumlah objek wisata seperti air terjun maupun objek wisata buatan kini tertata baik mulai dari jalan hingga fasilitas umum. Desa Sambangan kini telah berkembang menjadi tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara. Memiliki potensi alam, terutama air terjun serta akses yang dapat dilalui oleh sepeda, desa tersebut sangat berpeluang dikembangkan menjadi wisata minat khusus, sport tourism, adventuring, wisata lainnya dengan memanfaatkan air terjun (Darmawan, 2012; Manalu, 2020; Asriani dan Suprpta, 2021; Arystiana, 2021).

Banyaknya air terjun yang ada di Desa Sambangan diantaranya Air Terjun Tembok Barak, Air Terjun Canging, Air Terjun Dedari, Air Terjun Cemara, Air Terjun Aling-aling, Air Terjun Kembar, Air Terjun Kroya dan Air Terjun Pucuk (Manalu et.al: 2019), berbagai aktivitas wisata air terjun pun dikembangkan oleh masyarakat setempat. Selain wisata air terjun yang menawan, wisatawan juga bisa menikmati terasering cengana, jembatan cinta cengana, wisata adventure dan kuliner.

Bahkan keunikan bebatuan pada Air Terjun Tembok Barak, sangat baik untuk dikembangkan menjadi wisata geologi (wawancara Ida Bagus Oka Agastya, 20 Juni 2022). Wisata Geologi atau Geotourism adalah suatu kegiatan wisata alam yang berkelanjutan dengan fokus utama pada kenampakan geologis permukaan bumi dalam rangka mendorong pemahaman akan lingkungan hidup dan budaya, apresiasi dan konservasi serta kearifan lokal. Geowisata menawarkan konsep wisata alam yang menonjolkan keindahan, keunikan, kelangkaan dan keajaiban suatu fenomena alam yang berkaitan erat dengan gejala-

gejala geologi yang dijabarkan dalam Bahasa populer atau sederhana (Kusumahbrata, 1999 dalam Hidayat, 2002). Pada air terjun Tembok Barak di desa Sambangan memiliki bebatuan yang unik dengan warna yang khas, sangat berpotensi dikembangkan sebagai geowisata sehingga wisatawan yang berkunjung tidak hanya melihat sebuah atraksi namun juga mendapatkan sebuah pengetahuan terkait potensi berupa peningkatan pengayaan wawasan dan pemahaman proses fenomena fisik alam, yakni air terjun tersebut.



Gambar 1. Model pengembangan agrowisata Desa Sambangan dan sekitarnya

Gambar 1 menunjukkan model pengembangan agrowisata desa sambangan dan sekitarnya berdasarkan analisis SWOT. Faktor internal yang terdiri atas *strength* dan *weakness* yang akan menjadi dasar pengembangan Agrowisata Desa Sambangan, serta faktor internal yang terdiri atas *opportunity* dan *weakness* dalam pengembangan agrowisata di Desa Sambangan dan sekitarnya. Faktor eksternal dan internal yang teridentifikasi pada analisis SWOT dalam pengembangan agrowisata desa sambangan dan sekitarnya disajikan seperti Tabel 1

Tabel 1. Analisis SWOT dalam dalam pengembangan agrowisata desa sambangan dan sekitarnya

No	Faktor Strategis Internal	No	Faktor Strategis Eksternal
----	---------------------------	----	----------------------------

1	Luas lahan yang berpeluang untuk dikembangkan agrowisata	1	Lokasi agro serta sarana pendukung pencapaian lokasi
2	Jenis pertanian yang dikembangkan	2	Iklim yang memadai
3	Akses yang memadai, dapat diakses oleh kendaraan roda empat, dua, sepeda dan aman untuk pejalan kaki	3	Peran pemerintah yang mendukung pengembangan agrowisata
4	Kesiapan sumber daya manusia	4	Trend wisata berbasis alam yang memerhatikan budaya lokal
5	Relasi untuk pengembangan usaha (produksi, distribusi, dan pemasaran)	5	Ketersediaan lahan untuk parkir yang memadai
6	Modal usaha yang dimiliki	6	Peran akademisi terkait riset and development
7	Kontinuitas hasil pertanian	7	Kerjasama dengan mitra /industri pariwisata

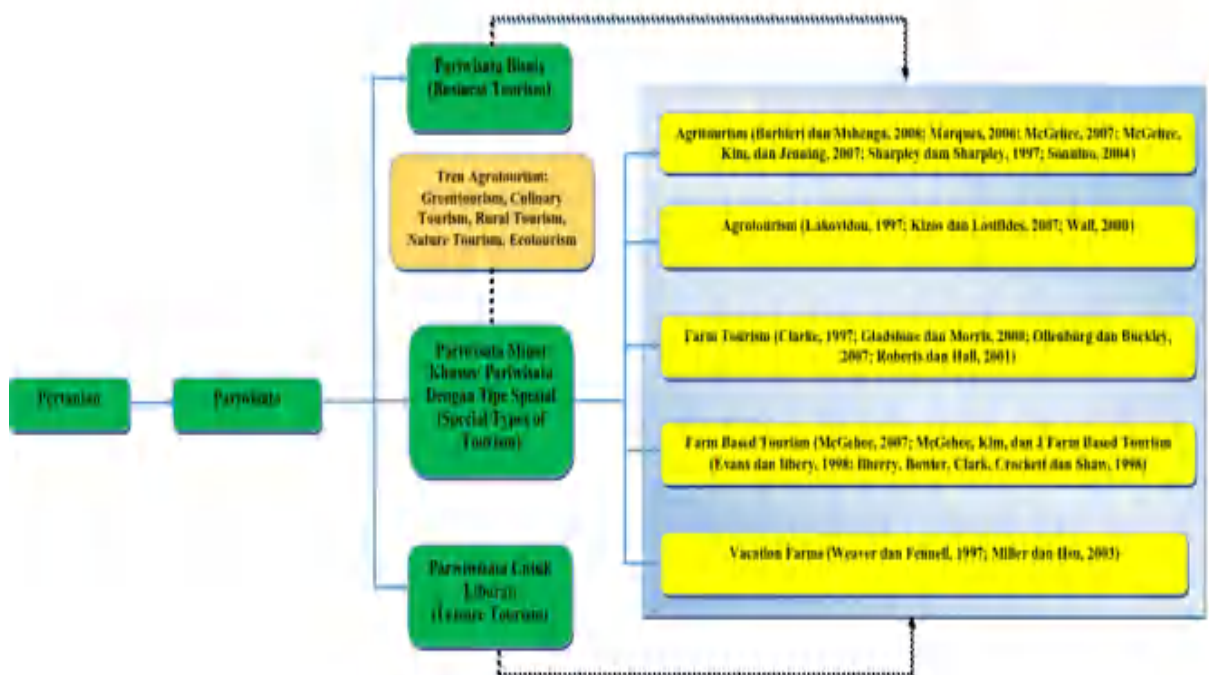
Untuk mendukung kegiatan pengembangan pariwisata di Desa Sambangan dan sekitarnya, pemerintah desa memberikan perhatian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, penyelarasan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dan merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan desa dalam periode enam tahun kedepan, yang disusun secara partisipatif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dalam setiap tahunnya, sehingga RPJM Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban visi dan mewujudkan misi pembangunan desa. RPJM Desa Terkait Pengembangan Pariwisata Sesuai Topik Kajian Pengembangan Model Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* Pada Desa Sambangan dan Sekitarnya Di Kabupaten Buleleng.

b. Model Desa Sambangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai Desa Agrowisata Berbasis *Tri Hita Karana* (THK) di Kabupaten Buleleng.

Pengembangan Desa Sambangan sebagai agrowisata tentu dilakukan dengan memahami potensi atau sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya budaya serta prasarana dan sarana yang mendukung. Berdasarkan hasil penelusuran pada ketiga desa yakni Desa Sambangan, Desa Panji dan

Desa Baktiseraga, ditemukan bahwa setiap desa tersebut memiliki sawah dan subak, yang menjadi fokus perhatian pada pengembangan agrowisata Desa Sambangan dan sekitarnya berbasis *Tri Hita Karana* (THK). Mengadopsi gagasan (Atmadja, 2020) *Tri Hita Karana* sebagai resep bertindak manusia Hindu Bali, dimana di dalam THK terdapat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang digunakan sebagai falsafah hidup dalam memahami dan memaknai segala sesuatu yang ada di sekitar kita.

Kolaborasi antara pertanian dengan pariwisata tentu membutuhkan kesepakatan serta kesepemahaman bersama, mengingat ada banyak konsep yang dapat dikembangkan dan tentunya berbasis pada ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, serta fasilitas baik prasarana dan sarana yang telah ada. Gambar 2, menunjukkan berbagai aspek telah menjadi pertimbangan dalam pengembangan pariwisata bersinergi dengan pertanian.



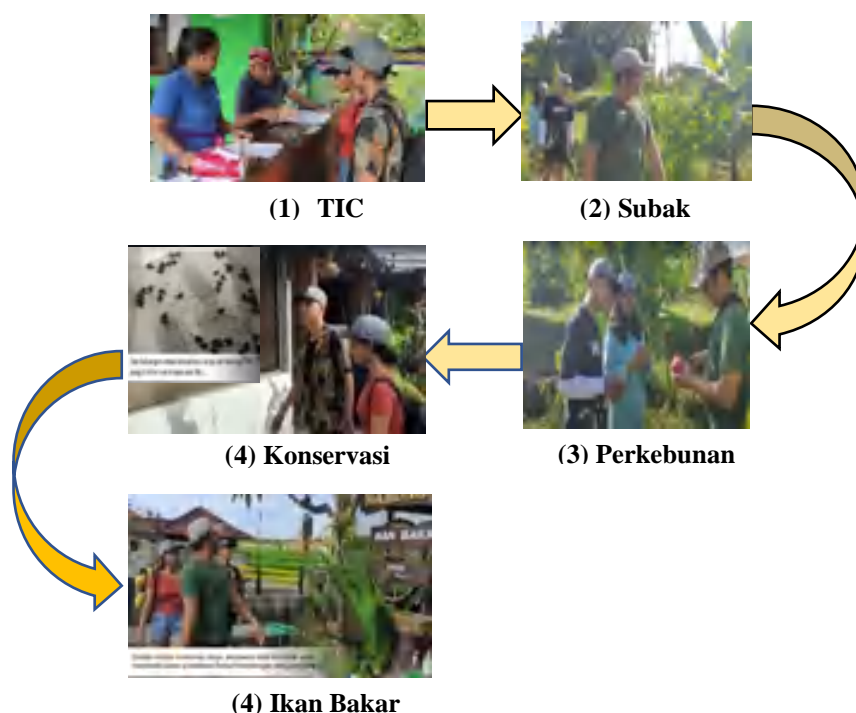
Gambar 2. Konsep Pertanian dan Pariwisata
Sumber: Sharon Phillip, Colin Hunter, Kirsty Blackstock (2010)

Philip, Hunter dan Blacstock (2010), menjelaskan bahwa pemanfaatan potensi pertanian dalam pengembangan pariwisata telah dikaji dengan berbagai cara dan konteks. Terdapat lima konsep yang dibangun oleh beberapa ahli tentang pemanfaat pertanian yang dipercaya memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bisnis pariwisata berbasis pertanian. Adapun lima konsep tersebut adalah (1) Agritourism memiliki karakteristik yakni praktik apa pun yang dikembangkan di pertanian yang bekerja dengan tujuan menarik pengunjung. Jenis pariwisata pedesaan tertentu di mana rumah hosting harus diintegrasikan ke dalam perkebunan pertanian, dihuni oleh pemilik, yang memungkinkan pengunjung untuk mengambil bagian dalam kegiatan pertanian atau kegiatan pelengkap di properti

itu; (2) Agrotourism, yakni kegiatan wisata berskala kecil, keluarga atau koperasi yang asalnya, sedang dikembangkan di daerah pedesaan oleh orang-orang yang bekerja di pertanian, adanya penyediaan peluang wisata di lahan pertanian; (3) Farm Tourism, yakni pariwisata pedesaan yang dilakukan di lahan pertanian di mana lingkungan kerja merupakan bagian dari produk dari perspektif konsumen; (4) Farm Based Tourism, yakni pertanian berbasis pariwisata; (5) Vacation Farms, yakni pertanian sebagai alternatif bagi individu untuk mencari kebutuhan rekreasi dan sekaligus untuk kebutuhan edukasi.

Pada implementasi kepariwisataan, mengadopsi gagasan (Gede et al., 2016), untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, nilai-nilai yang ada dalam falsafah *Tri Hita Karana* senantiasa menjadi pedoman, baik pada tahap perencanaan, dan pelaksanaannya. Begitupula dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang memerhatikan tiga unsur harmoni yakni arif pada unsur *parhyangan*, arif pada *pawongan*, dan arif pada *palemahan* (Atmadja, 2020). Dengan demikian, pengembangan desa wisata, khususnya Desa Sambangan dan sekitarnya dapat berkembang dengan baik dan menjunjung prinsip berkelanjutan, baik pada unsur manusia, kehidupan budaya dan tradisi, serta lingkungannya.

Melalui analisis atas hasil temuan pada ketiga desa (Desa Sambangan, Desa Panji dan Desa Baktiseraga), maka untuk desa Sambangan dan wilayah sekitarnya dapat dikembangkan dua model agro wisata, yakni (1) Agrosubak dan (2) Agroventure. Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya dapat dilakukan dengan perjalanan (*track*) yakni TIC Aling-aling, Subak Sambangan, Perkebunan Buah Naga, Konservasi Penyu dan Makan Ikan Bakar.



Gambar. 3 *Track* Agrosubak model agrowisata desa Sambangan dan sekitarnya

Track Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya di mulai dari TIC Aling-aling, dimana pihak pengelola TIC memberikan informasi tentang keberadaan subak yang ada di Desa Sambangan dan sekitarnya yang senantiasa wajib saling memberikan dukungan, mengingat kebutuhan air pada ketiga desa tersebut. Subak Sambangan memiliki suasana yang asri dan sejuk, sehingga subak tersebut dapat dijadikan sebagai tempat swafoto. Subak Sambangan yang memiliki luas 91 hektar (Febrianto, et.al: 2021) juga digunakan sebagai jalur tracking untuk menuju air terjun Aling-aling. Pada perjalanan ini, wisatawan yang memiliki motivasi budaya atau untuk kegiatan penelitian, akan diajak mengunjungi subak, berinteraksi dengan pengelola subak atau petani yang sedang bekerja di ladang. Untuk paket wisata ini subak yang dipilih adalah Subak Sambangan. wisatawan akan diajak ke Subak Sambangan untuk mendapat pengetahuan tentang peranan subak dan pentingnya subak dalam menjaga harmonisasi pada tiga unsur yakni *pawongan* (dalam wujud organisasi subak), *palemahan* (pemertahanan lahan pertanian dan penjagaan terhadap kualitas air yang juga melibatkan peran serta subak), dan *parahyangan* (pemertahanan ritual terkait pertanian baik berdasarkan *wuku* maupun *sasih*).

Perjalanan wisata pada paket ini dilanjutkan ke kebun buah naga yang merupakan milik warga Desa Sambangan. Wisatawan akan dipertemukan dengan pemilik kebun buah naga. Aneka olahan buah naga dapat disuguhkan kepada wisatawan, seperti buah naga potong tanpa topping, buah naga potong dengan topping, jus buah naga. Manfaat buah naga (Wiardani et.al: 2014; Chrisanto et.al: 2020), baik untuk mengendalikan kadar gula dalam darah, sehingga baik pula bagi penderita diabetes. Di kebun buah naga ini juga akan berikan informasi dan cara memanfaatkan buah naga sebagai pewarna makanan alami, serta cara baik membuat jus buah naga tanpa tambahan gula mengingat rasa manis alami yang telah dimiliki oleh buah naga tersebut. Berada di lokasi yang kondusif, suasana alam yang masih natural disekitarnya, suasana yang sejuk, wisata agro dengan memanfaatkan potensi buah naga ini menjadi baik untuk dikembangkan dalam mendukung paket wisata Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya.

Perjalanan selanjutnya pada paket Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya adalah menuju Desa Baktiseraga untuk melihat penangkaran penyu dan tentunya diakhiri dengan makan ikan bakar yang enak dan banyak tersedia di pinggir pantai. Paket dengan perjalanan wisata yang mengajak wisatawan berkunjung pada lima lokasi dapat ditempuh dalam waktu lima sampai tujuh jam, yang dapat dikategorikan dalam *half day tour*.

Adapun rincian kegiatan, waktu, dan biaya yang ditimbulkan pada paket wisata Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut.

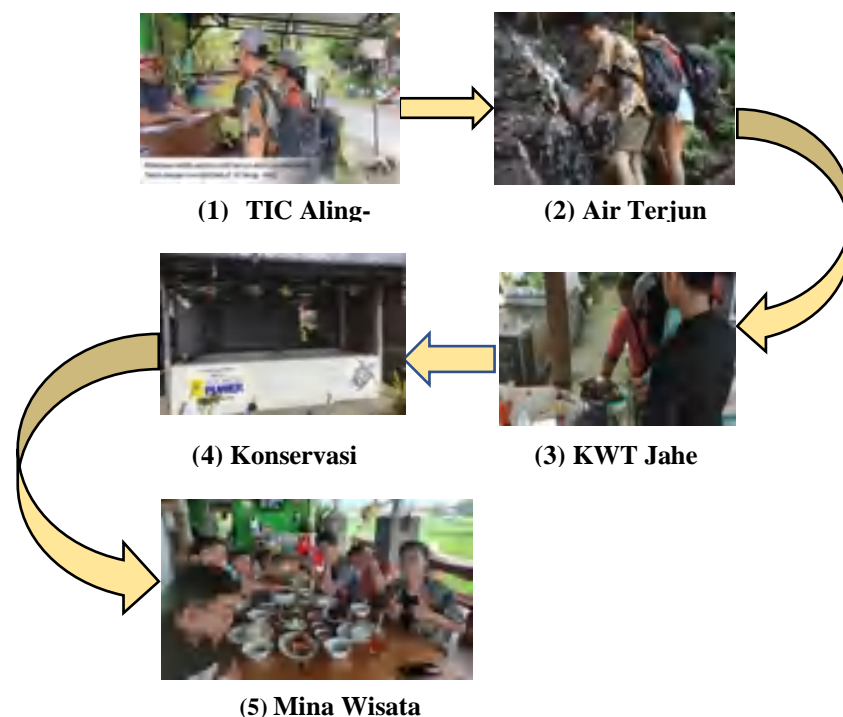
Tabel. 2 Rincian Paket Wisata Agrosubak

No	Titik Poin Tujuan	Waktu	Transportasi	Perlengkapan	Kebutuhan biaya
1	TIC Aling-aling (mendapat penjelasan paket)	11.00 wita	Mobil, motor, sepeda	Pakaian casual, santai, sepatu yang nyaman	Entrance fee berwisata ke desa. Mendapat local guide Rp. 200.000,-
2	Subak Sambangan (menikmati pemandangan, eyes healing, swa foto, healthy food by farmer)	11.30	Mobil, motor, sepeda	Kamera, rekaman dan notebook (wisata riset)	<i>Narasumber (untuk wisata riset) berupa donasi.</i> Makanan dan minuman (buah kelapa, jagung, ketela) Rp.50.000,- / pax
3	Perkebunan Buah Naga (melihat buah naga, memetik, mengolah buah naga menjadi aneka makanan dan minuman, dan membelinya sebagai cinderamata)	13.30	Mobil, motor, sepeda	Peralatan makan dan minum, juicer, pisau, isian tambahan (topping), tas kain untuk yang membeli buah, alat timbang buah.	Produk buah naga. Rp. 50.000,- /pax (all you can eat at spot) Rp.35.000 / kg (termasuk tas kain)

4	Konservasi Penyu	15.30	Mobil, motor, sepeda	Kamera, rekaman dan notebook (wisata riset)	Donasi untuk konservasi penyu. Rp. 100.000,-/tukik (melepas tukik)
5	Makan Ikan Bakar	17.00	Mobil, motor, sepeda	Kerjasama dengan pemilik tempat makan.	Makanan dan minuman. Harga mulai dari Rp.75.000,- / pax

Harga sesuai uji lapangan diperkirakan Rp. 535.000/ pax (dengan biaya *local guide*). Jika biaya di sharing untuk *local guide* biaya diperkirakan Rp. 385.000,-/pax (dengan jumlah satu grup adalah 4 orang).

- (1) Agroventure Desa Sambangan dan sekitarnya dapat dilakukan dengan perjalanan (*track*) yakni TIC Aling-aling, Air Terjun Aling-aling, Kelompok Wanita Tani (KWT) Jahe Merah, Konservasi Penyu dan Mina Wisata di Desa Baktiseraga.



Gambar 4. *Track Agroventure* model agrowisata desa Sambangan dan sekitarnya

Track Agroventure Desa Sambangan dan sekitarnya mengajak wisatawan untuk ke salah satu air terjun yang airnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan pertanian. Mengadopsi Ahmadi (2017) terdapat beberapa jenis agrowisata yaitu agrowisata tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, dimana masing-masing jenis agrowisata tersebut memiliki karakter yang berbeda sehingga memerlukan pengelolaan yang berbeda pula. Penyajian produk/komoditas agrowisata harus dikemas dengan baik agar wisatawan merasa puas menikmatinya. Mengadopsi gagasan tersebut, wisatawan akan diberikan informasi tentang perjalanan agroventure yang terdiri atas sumber air, pemanfaatan air bagi pertanian, tempat pengolahan jahe merah menjadi produk minuman berkhasiat, tempat konservasi penyu dan terakhir wisatawan akan diajak mina wisata di daerah penimbangan Desa Baktiseraga.

Agroventure yang dirancang dalam penelitian ini adalah agrowisata yang memberikan kesempatan kepada wisatawan tentang bisnis yang dapat dikembangkan melalui pengolahan hasil pertanian, serta mengajak wisatawan menikmati petualangan selama perjalanan wisatanya. Awal perjalanan wisatawan diajak ke air terjun yang selain sebagai sumber air bagi masyarakat desa juga terdapat warisan yakni sebagai situs geologi terbentuk dari terendapkannya material hasil letusan Gunung api Buyan-Beratan Purba yang mengalami patahan menurun akibat proses deflasi dari runtuhnya tubuh gunung api akibat letusan kaldera. Dengan demikian wisatawan tidak saja hanya melihat dan melakukan aktivitas di air terjun tersebut, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang situs geologi. Kemudian, wisatawan diajak ke kelompok wanita tani (KWT) yang mengolah jahe merah menjadi bahan minuman, bahkan produknya telah banyak dijual. Wisatawan di lokasi tersebut akan diajak untuk mengenal manfaat jahe merah, cara pengolahannya, pengemasannya, serta pembuatan aneka minuman jahe merah. Selanjutnya, perjalanan wisata dilanjutkan ke Desa Baktiseraga untuk melihat penangkaran penyu, dan juga bisa ikut melepas tukik dengan donasi Rp.100.000,- per tukik sebagai wujud keikutsertaan konservasi alam. Paket wisata ini diakhiri dengan mina wisata, yakni wisatawan diajak untuk memilih warung ikan bakar yang mereka inginkan, yang mana mereka telah diberikan informasi tentang perkiraan biaya makan yang bergantung dari harga ikan yang dipilih oleh wisatawan.

Adapun rincian kegiatan, waktu, dan biaya yang ditimbulkan pada paket wisata Agroventure Desa Sambangan dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Rincian Paket Wisata Agroventure

No	Titik poin Tujuan	Waktu	Transportasi	Perlengkapan	Kebutuhan biaya
1	TIC Aling-aling	11.00 wita	Mobil, motor, sepeda	Pakaian casual, santai, sepatu yang	<i>Entrance fee</i> berwisata ke desa. Mendapat

				nyaman	local guide Rp. 200.000,-
2	Air Terjun Aling-aling (menikmati air terjun, mandi, swafoto, cerita tentang geologi, sound healing)	11.30 wita	Jalan Kaki	Pakaian casual, santai, sepatu yang nyaman, pakain ganti, pelampung, kamera	Sewa pelampung , handuk, bath kits. Rp.50.000,- /pax
3	KWT Jahe Merah (mengolah jahe merah menjadi aneka minuman yang menyegarkan)	14.00 wita	Mobil, motor, sepeda	Kamera	Biaya pembelian produk eduwisata susu jahe/ teh jahe /kopi jahe Rp. 50.000,- /pax Cinderatama Rp. 50.000,- (termasuk tas kain)
4	Konservasi Penyu	16.30 wita	Mobil, motor, sepeda	Kamera, rekaman dan notebook (wisata riset)	Donasi untuk konservasi penyu. Rp. 100.000,-/ tukik (melepas tukik)
5	Mina Wisata	17.30	Mobil, motor, sepeda	Kerjasama dengan pemilik tempat makan.	Makanan dan minuman. Harga mulai dari Rp.75.000,- / pax

Harga sesuai uji lapangan diperkirakan Rp. 525.000,-/ pax (dengan biaya local guide). Jika biaya di sharing untuk local guide dan

eduagrowisata di KWT Jahe Merah biaya diperkirakan Rp. 334.500,-/pax (dengan jumlah satu grup adalah 4 orang).

Berdasarkan hasil uji lapangan yang dilaksanakan oleh tim peneliti yang di dukung oleh mahasiswa D4 Pengelolaan Perhotelan Universitas Pendidikan Ganesha, paket disusun dengan memahami potensi, kemudahan akses serta keunggulan yang dapat diberikan kepada wisatawan, sebagai value proposition atas (1) Paket Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya, dan (2) Paket Agroventure Desa Sambangan dan sekitarnya.

Melalui dua model paket wisata yang ditawarkan, selanjutnya dapat dijadikan bahan dalam mengembangkan agrowisata di Desa Sambangan dan sekitarnya. Namun, untuk mampu memahami bentuk kerjasama yang dapat dibangun melalui pemanfaatan dua model agrowisata yang ditawarkan, maka penyusunan bisnis model canvas dapat menjadi solusi untuk mengetahui poin-poin yang patut menjadi perhatian oleh para pihak yang akan terlibat. Strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, pengertian Bisnis Model Canvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. Bisnis Model Canvas (BMC) merupakan alat manajemen strategis yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan serta mengomunikasikan ide atau konsep bisnis yang akan atau telah dibuat. Dalam BMC terdapat informasi tentang elemen fundamental bisnis atau produk termasuk juga tentang pelanggan. Berikut model BMC (Bisnis Model Canvas) yang dapat ditawarkan untuk (1) Paket Agrosubak Desa Sambangan dan sekitarnya, dan (2) Paket Agroventure Desa Sambangan dan sekitarnya.

Business Model Canvas terdiri dari 9 elemen penting, di antaranya: 1) *Customer Segments*; 2) *Value Proposition*; 3) *Channels*; 4) *Revenue Streams*; 5) *Key Resource*; 6) *Customer Relationship*; 7) *Key Activities*; 8) *Key Partnership*; 9) *Cost Structure*

Sembilan elemen tersebut merupakan panduan bagi pelaku bisnis dalam menentukan sistem kerja perusahaan, sekaligus media untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan apakah sudah berjalan sesuai sistem. Berikut adalah Bisnis Model Canvas untuk Agrowisata Desa Sambangan.



Gambar 5. Bisnis Model Canvas Agrowisata Desa Sambangan dan Sekitarnya

Bisnis Model Canvas (BMC) diperlukan untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide, memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide, mengetahui dengan jelas konsumen, tujuan bisnis, prediksi biaya serta pemerolehan pendapatan. Dalam BMC ini dapat diketahui value proposition yang merupakan pondasi bisnis atau produk. Melalui value proposition juga diketahui pertukaran nilai antara bisnis atau produk yang ditawarkan dengan pelanggan/ konsumen/ wisatawan.

SIMPULAN

Desa Sambangan dan sekitarnya memiliki potensi yang dapat dikelola menjadi agrowisata berbasis *Tri Hita Karana* (THK). Memiliki pertanian yang luas serta subak yang masih bertahan hingga saat ini, memberikan peluang pada Desa Sambangan dan sekitarnya untuk mengembangkan dirinya sebagai agrowisata. Selain pertanian berupa lahan sawah, tersedianya perkebunan seperti buah naga, pengolahan jahe merah menjadi produk minuman, serta adanya konservasi hewan laut, dapat mendukung Desa Sambangan dan sekitarnya mengembangkan agrowisata berbasis *Tri Hita Karana* (THK) di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan studi lapangan dan dokumentasi, ditemukan faktor strategis internal dan eksternal diantaranya luas lahan, jenis pertanian, iklim yang memadai, akses yang baik, dukungan pemerintah baik daerah maupun desa yang tertuang dalam SK Bupati serta RPMJ Desa, kesiapan sumber daya manusia, tren pariwisata alam yang semakin berkembang, serta tersedianya mitra yang mendukung kegiatan pariwisata di Desa Sambangan dan sekitarnya.

Melalui analisa kekuatan serta peluang yang ada, terdapat dua model agrowisata berbasis *Tri Hita Karana* yang dapat dikembangkan di Desa Sambangan dan sekitarnya yaitu Agrosabak dan Agroventure.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, A. A. I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Arida, I. N. S., & Pujani, L. K. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa wisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 1-9.
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36389/21967>
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/18006/15758>
- Arka, I. W. (2016). Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa dalam Pembangunan Desa Pekraman Sebagai Desa Wisata di Bali. *Ganec Suara*, 10(2), 78-84.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Fauzy dan Putra. (2015) Pemetaan Lokasi Potensi Desa Wisata di Kabupaten Sleman Tahun 2015. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* Volume 4 No. 2, Mei 2015 Halaman 124-129.
- Hilman. (2017) Kelembagaan Kebijakan Pariwisata Di Level Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2 Nomor 2, Oktober 2017, (Hlm 150-163).
- Kumurur & Setia Damayanti. (2011) Pola Perumahan dan Pemukiman Desa Tenganan Bali. *Jurnal Sabua* Vol.3, No.2: 7-14, Agustus 2011.
- Miles, B and Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Rohendi Rohedi. Jakarta; UI-Press.
- Mahardika dan Darmawan. (2016) Civic Culture dalam Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan. *HUMANIKA* Vol. 23 No.1 (2016).
- Nurulitha Andini. (2013) Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Wisata: Studi Kasus Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24 No. 3, Desember 2013, hlm.173-188.
- Nalayani, N. N. A. H. (2016). Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*.
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/view/18354/11882>
- Ratu, C., & Adikampana, I. M. (2016). Strategi Pemasaran Desa Wisata Blimbingsari Kabupaten Jembrana. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(1), 60-67.
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/23287>
- Sri Astuti (2016) Strategi Pengembangan Potensi Desa Mengesta Sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1 Maret 2016.
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Saputra dan Setiawan (2014) Potensi Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

- (The Mangrove Forest Ecotourism Potential In Merak Belantung Village Of Kalianda Sub District In South Lampung Regency). *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 2 No. 2, Mei 2014 (49-60)
- Sumantra, dkk (2015) Pengembangan Model Agrowisata Salak Berbasis Masyarakat Di Desa Sibetan. *Jurnal Bakti Saraswati* Vol.04 No.02. September 2015.
- Suastika dkk, (2019) Traditional Life Of Bayung Gede Community and its Development as Cultural Attraction. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events* Vol.3 No.1 June 2019, Halaman 93-106.
- Prafitri dan Damayanti. (2016) Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang*. [Vol 4, No 1 \(2016\)](#).
- Pageh, dkk. (2018). Model Revitalisasi Ideologi Desa Pakraman Bali Aga Berbasis Kearifan Lokal. Singaraja: Rajawali Pers
- Utomo, S. J., & Satriawan, B. (2017). Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Jurnal Neo-Bis*, 11(2), 142-153.
- Waruwu, D., Erfiani, N. M. D., Darmawijaya, I. P., & Kurniawati, N. S. E. (2020). Pengembangan Tanaman Herbal sebagai Destinasi Wisata di Desa Catur, Kintamani, Bali. *Jurnal Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 4(1), 1-10.
- Widiastini, (2016) Social Practice Of Pedagang Acung (Vendors) at Kintamani Tourist Area, Bangli, Bali. *Journal of Cultural studies*. Vol 9. No 2.
- Widiastini, dkk (2018) Women as Souvenir Vendors: An Effort to the Achievement of Gender Equality Through the Strengthening of the Economic Base of the Family. *China-USA Business Review*, Jan. 2018, Vol. 17, No. 1, 44-52.

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TEJAKULA DAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

**Agus Jana Susila¹, I Nengah Suastika², A. A. Istri Dewi
Adhi Utami³ Luh Sri Eka Sari⁴**

**Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas
Pendidikan Ganesha, Indonesia¹²³
Balitbang Inovda Buleleng⁴**

Email: nengah.suastika@undiksha.ac.id¹, dhi.utami@undiksha.ac.id²,
luhsrieka1980@gmail.com⁴

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk dijadikan dasar pengembangan jenis industri di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar dalam rangka memperkuat pertumbuhan industri di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi pasar terhadap produk industri yang terdapat di Kecamatan Banjar dan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi dan kamera sebagai perekam situasi sedangkan sumber datanya meliputi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pekerjanya, kepala desa dan camat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar memiliki sumber daya alam yang kaya dengan aneka jenis buah-buahan dan biji, kayu dan bambu serta adanya aktivitas dibidang industri tekstil dan produk. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia di kedua Kecamatan ini tergolong memadai hal ini didukung oleh adanya SMA dan SMK di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar. Berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya, beberapa sektor industri yang relevan untuk dikembangkan di Kecamatan Tejakula dan kecamatan Banjar diantaranya industri olahan buah-buahan dan biji, serta industri olahan kayu dan bambu. Khusus untuk industri tekstil dan produk tekstil juga sangat prospektif dikembangkan di Kecamatan Tejakula. Teridentifikasinya jenis-jenis industri yang prospektif untuk dikembangkan di kedua Kecamatan ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan industri di Kabupaten Buleleng.

Kata kunci: Sumber daya alam, buah-buahan, bambu, pengembangan industri,

Abstract

The research is aimed to identify the potential of natural and human resources as the basis for the development of the industrial types in the Tejakula and Banjar districts in order to strengthen industrial growth in Buleleng Regency. This qualitative research describes the potential of natural resources, human resources, and market potential for industrial products in Banjar and Tejakula Districts, Buleleng Regency. The instruments used were interview guidelines, observation sheets, and cameras as situation recorders. At the same time, the data sources included micro, small, and medium enterprises and their workers, village heads, and head of the district. The results showed that the Tejakula and the Banjar Districts had rich natural resources with various types of fruits and seeds, wood, and bamboo as well as activities in the textile and product industries. In addition, the quality of human resources in these two sub-districts is quite adequate. This is supported by the existence of high schools and vocational schools in Tejakula and Banjar districts. Based on the potential of its natural resources and human resources, several relevant industrial sectors to be developed in Tejakula and Banjar sub-districts include the fruit and seed processing industry, as well as the wood and bamboo processing industry. Especially for the industry of textile and textile products are also very prospective to be developed in Tejakula District. The development of this type of industry in these two regencies will have an impact on strengthening industrial growth in Buleleng Regency

Key words: natural resources, fruits, bamboo, industrial development

PENDAHULUAN

Pembangunan Industri dalam suatu daerah merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya terhadap output daerah, pembangunan industri juga berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan. Industri sebagai salah satu pilar ekonomi, memberikan peran yang cukup besar untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat (Utomo, A. P., 2016; Abdillah, Y., 2016). Oleh karena itu berbagai usaha untuk mendorong tumbuh berkembangnya industri di suatu daerah sangat diperlukan. Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait pembangunan industri nasional kedepannya. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, telah mengubah paradigma pembangunan industri kedepannya. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang mana regulasi ini memberikan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi $8^{\circ} 03' 40''$ sampai $8^{\circ} 23' 00''$ lintang selatan dan $114^{\circ} 25' 55''$ sampai $155^{\circ} 27' 28''$ bujur timur. Kabupaten Buleleng memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut: Laut Bali (Utara), Kabupaten Karangasem (Timur), Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli (Selatan). Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 Ha atau 24,25% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha). Secara administrasi Kabupaten Buleleng, terbagi menjadi 9 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan, Buleleng, Sukasada, Banjar, Seririt, Busungbiu dan Grokgak. Ibukota Kabupaten Buleleng adalah Singaraja. Dengan luas wilayah yang sangat memadai dan kondisi geografis perpaduan antara pegunungan dengan pantai menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai daerah potensial dalam pengembangan industri (Iswardoyo, J., 2019; Indrayani, L., 2020). Namun, demikian kajian yang bersifat mendalam dan komprehensif berkaitan dengan potensi industri, sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri di Kabupaten Buleleng, ketersediaan secara berkelanjutan bahan baku, kondisi sosial budaya masyarakat dan analisis potensi pasar dalam jangka Panjang sampai saat ini belum dilakukan. Bertalian dengan itu, dibutuhkan adanya kajian yang bersifat ilmiah, untuk memberikan gambaran tentang potensi pengembangan industri di Kabupaten Buleleng sesuai dengan analisis kondisi empirik (Antara, G. E. D., 2015).

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng dan keterbatasan sumber waktu pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini akan difokuskan pada dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar. Pemilihan kedua kecamatan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) secara geografis wilayah Kecamatan Tejakula terletak di wilayah timur dan Kecamatan Banjar berada di wilayah barat, sehingga kedua kecamatan ini mampu menjadi acuan bagi wilayah timur dan barat Kabupaten Buleleng, (2) keberagaman potensi sumber daya alam, bahan baku industri, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar dapat menjadi acuan bagi kecamatan lainnya yang bersifat similar, dan (3) hasil analisis pada kedua kecamatan akan menjadi role model bagi kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng (Rochani, A., 2017, August).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penggambaran secara mendalam dan komprehensif bertalian dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi pasar produk industri (Miles and Huberman, 1992). Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrument*). Hal ini didasari pada pertimbangan, bahwa hanya penelitalah yang dapat melakukan pengumpulan data dari berbagai informan penelitian secara fleksibel hingga tercapainya kejenuhan data. Dalam kapasitasnya sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpul data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, format studi dokumentasi dan kamera sebagai alat perekam situasi (Sugiyono, 2010). Informan penelitian terdiri dari beberapa pihak, yaitu: (1) pelaku usaha mikro kecil dan menengah, (2) pekerja UMKM, (3) kepala desa, dan (5) camat . Informan Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “*snowball sampling technique*” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data dimana informasi/data telah terkumpul secara tuntas (Spradley 1980). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu (1) koleksi data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 1984). Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden. Untuk mencapai hal itu, maka peneliti berusaha berpikir secara “divergen yang kreatif tetapi kritis” (Sukadi, 2011), sehingga subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat dieliminir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Daya Alam dan Bahan Baku Industri di Kecamatan Tejakula dan Banjar

Mengawali pembahasan pada pemetaan sumber daya alam, akan dirujuk salah satu regulasi yang memberikan arah pembangunan industri di Provinsi Bali. Rujukan ini diharapkan mampu memberikan relevansi antara potensi SDA dengan kebutuhan bahan baku yang mampu mendukung industri yang dimaksud. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 pada bagian lampiran Sasaran dan Program memetakan potensi pengembangan industri di Kabupaten Buleleng melingkupi: (1) Pengembangan Industri Buah-buahan; (2) Pengembangan Industri Pengolahan Biji Kopi; (3) Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil; (4) Pengembangan Industri Kerajinan Kayu; dan, (5) Pengembangan Industri Kerajinan Bambu. Secara umum penutupan lahan di kabupaten Buleleng di dominasi

oleh Hutan berupa hutan lahan sekunder kerapatan sedang hingga Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi, Kebun campuran dan Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/beda. Kecamatan Banjar yang merupakan wilayah Kabupaten Buleleng bagian tengah didominasi oleh penggunaan lahan kebun campuran dan Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera (Putri, N. L. P. T. I., & Citra, I. P. A., 2018).. Kemudian Kecamatan Tejakula yang merupakan Kabupaten Buleleng bagian timur didominasi oleh penggunaan lahan Kebun campuran dan Perkebunan tanaman semusim lain. Terdapat lima besar jenis komoditas tanaman pangan yang cocok dikembangkan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi komoditas tanaman pangan di Kecamatan Banjar tahun 2021.

No	Nama Komoditas	Luas Tanah (ha)	Produksi (ton)
1	Padi	1.260,20	7.120,10
2	Kopi (Robusta & Arabika)	2.082,43	1.157,3
3	Kelapa (Dalam)	895	828, 27
4	Ubi Kayu	50	618, 05

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku industri yang bersumber dari tanaman padi, palawija, dan komoditi lainnya di Kecamatan Banjar yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah industri dengan memanfaatkan bahan baku berupa Padi (7.120,10 ton per tahun), Kopi jenis Robusta & Arabika (1.157,3 ton per tahun), Kelapa (828, 27 ton per tahun), Ubi Kayu (618, 05 ton per tahun), dan Cengkeh (580, 39 ton per tahun) (Yeny, N. P., Atmadja, A. T., Kurniawan, P. S., & ST, M., 2017). Dilain pihak, lima besar jenis buah-buahan yang terdapat di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi tanaman buah di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tahun 2021.

No	Nama tanaman	Jumlah Pohon	Produksi (ton)
1	Jeruk Besar/Siem	220.731	3. 295
2	Anggur	52.970	1. 940
3	Pisang	105. 855	1. 830
4	Durian	45.001	1.620
5	Mangga	22. 489	1.562

Data yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku industri yang bersumber dari buah-buahan di Kecamatan Banjar yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah industri dengan memanfaatkan bahan baku Jeruk Besar/Siem (3.295 ton per tahun), anggur (1.940 ton per tahun), pisang (1.830 ton per tahun), Durian (1.620 ton per tahun), dan Mangga (1.562 ton per tahun). Lima besar produksi tanaman Padi, Palawija, dan komoditi lainnya di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi komoditas tanaman pangan di Kecamatan Banjar tahun 2021.

No	Nama komoditas	Luas Tanah (ha)	Produksi (ton)
1	Ubi Kayu	335	4.140, 94
2	Jagung	579	2. 208, 90
3	Kelapa (Dalam, Hibrida, & Genjah)	1.458,50	1. 669,37
4	Cengkeh	731	194,7
5	Kopi (Robusta & Arabika)	282	141,93

Tabel 3 menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku industri yang bersumber dari tanaman padi, palawija, dan komoditi lainnya di Kecamatan Tejakula yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah industri dengan memanfaatkan bahan baku Ubi Kayu (4.140,94 ton per tahun), Jagung (2.208,90 ton per tahun), Kelapa (1.669,37 ton per tahun), Cengkeh (194,7 ton per tahun), Kopi (141,93 ton per tahun), dan Jambu Mete (139,04 ton per tahun). Sedangkan lima besar produksi buah-buahan di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi tanaman buah di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tahun 2021.

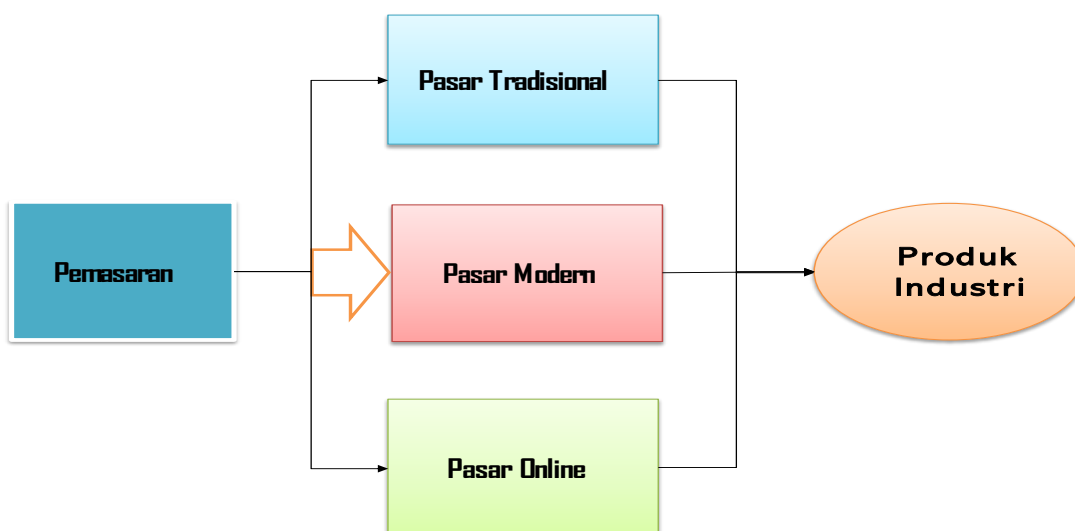
No	Nama tanaman	Jumlah Pohon	Produksi (ton)
1	Rambutan	34. 530	7. 478
2	Mangga	160. 987	5.622
3	Pisang	99. 230	5.154
4	Jeruk Keprok	64. 247	671
5	Nangka	13. 044	587

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat dikatakan bahwa ketersediaan bahan baku industri yang bersumber dari buah-buahan di Kecamatan Tejakula yang paling berpotensi untuk dikembangkan

adalah industri dengan memanfaatkan bahan baku Rambutan (7. 478 ton per tahun), Mangga (5. 622 ton per tahun), Pisang (5.154 ton per tahun), Jeruk Keprok (671 ton per tahun), dan Nangka (587 ton per tahun). Walaupun durian menduduki posisi nomor 6, namun durian memiliki potensi yang sangat prospektif, karena merupakan salah satu tanaman primadona di masyarakat (Januarsa, I. N., & Luthfi, O. M., 2017).. Bahkan saat ini masyarakat sedang menggandrungi durian sebagai tanaman favorit, mengalahkan tanaman manga dan tanaman durian. Bertalian dengan itu, industri olahan buah durian merupakan salah satu alternatif pengembangan industri di Kecamatan Tejakula.

B.Potensi Pemasaran Produk Industri di Kecamatan Tejakula dan Banjar

Pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah atau area bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli (Faridah, F., & Wulandari, Z. W., 2020). Maka dari itu, konsep pasar bisa berada di mana saja, tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu, namun yang utama adalah pada proses penjualan dan pembelian. Berdasarkan pada analisis data yang dilakukan ada tiga jenis pasar yang menjadi tempat pemasaran industri kecil dan menengah yang ada di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar, yaitu: pasar tradisional, pasar modern dan pasar online. Ketiga pasar ini telah dikenal oleh masyarakat penghasil industri untuk memasarkan barang yang telah diproduksi. Secara paradigmatis tempat pemasaran industri kecil dan menengah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tempat Pemasaran Produk Industri di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar

Pasar tradisional yang dijadikan sebagai tempat untuk memasarkan produk industri di Kecamatan Tejakula adalah pasar tradisional Madenan, pasar tradisional Tejakula dan Pasar tradisional Bondalem. Ketiga pasar ini memiliki tempat yang memadai dan sangat terjangkau dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Tejakula, sehingga selalu ramai didatangi penjual dan pembeli. Adapun produk industri yang diperjual belikan di Pasar Madenan, Pasar Bondalem dan Pasar Tejakula adalah industri olahan bambu seperti tas buah, bokor, keben, industri olahan lontar seperti jaritan daun lontar dan gula juruh lontar, industri olahan kelapa yaitu hiasan dari janur, anyaman ingka, perabotan dari batok kelapa, industri olahan buah seperti kopi serbuk, minyak *virgin coconut oil* (VCO), *sengait*, minyak goreng tradisional, emping beras, industri olahan laut seperti garam laut, abon ikan laut, industri produksi tekstil yaitu tenun bebalian dan tenun cag-cag. Pasar tradisional yang dijadikan sebagai tempat untuk memasarkan produk industri di Kecamatan Banjar adalah pasar tradisional Banjar, pasar tradisional Munduk, dan pasar tradisional Banyuatis. Ketiga pasar ini memiliki tempat yang sangat strategis dan mudah terjangkau dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Banjar, sehingga selalu ramai didatangi oleh penjual dan pembeli. Adapun produk industri yang diperjual belikan di pasar pasar tradisional Banjar, pasar tradisional Munduk, dan pasar tradisional Banyuatis adalah industri olahan bambu seperti lampu hias, keben, bedeg, industri olahan aren seperti tuak, gula semut, permen gula aren dan ceker ayam, industri olahan buah seperti kopi bubuk mola dan *wine* anggur, industri olahan kayu seperti meja, kursi, tempat lampu dan jendela. Selain melalui pasar tradisional penjualan produk industri di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar juga telah dilakukan secara online melalui berbagai media sosial (Fauzi, R. U. A., Kadi, D. C. A., Waluyo, W., Zakaria, M. A., Lestari, E., Octavia, N., & Laksono, N. T., 2021).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar memiliki sumber daya alam yang potensial, khususnya bertalian dengan pengembangan industri pengolahan buah-buahan dan biji, industri pengolahan kayu dan bambu dan industri pengembangan tekstil dan produk tekstil. Demikian juga dengan ketersediaan sumber daya manusia, telah sangat memadai dengan adanya 3 SMA pada kedua Kecamatan dan ada 2 SMK di Kecamatan Tejakula dan 1 SMK di Kecamatan Banjar. Sedangkan industri yang relevan dikembangkan sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta ketersediaan bahan baku adalah industri olahan buah-buahan dan biji, industri olahan bambu dan industri olahan bambu. Sedangkan industri tekstil dan produk tekstil cocok dikembangkan di Kecamatan Tejakula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. (2016). Inovasi dan pengembangan produk UKM handikraf untuk pasar pariwisata di Bali. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(2), 52-65.
- Agusyani, N. K. S., Edy Sujana, S. E., & Wahyuni, M. A. (2016). Pengaruh whistleblowing system dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan penerimaan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kabupaten buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3).
- Antara, G. E. D. (2015). Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali. *Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri*, 9(3), 182925.
- Faridah, F., & Wulandari, Z. W. (2020). Pendampingan Pemasaran Industri Lokal Melalui Penggunaan Marketplace untuk Meningkatkan Hasil Produksi pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sidomukti Lamongan. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 509-523.
- Fauzi, R. U. A., Kadi, D. C. A., Waluyo, W., Zakaria, M. A., Lestari, E., Octavia, N., & Laksono, N. T. (2021). Internet Marketing Strategi Untuk Meningkatkan Pemasaran Industri Kopiah Desa Temboro Karas Magetan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 17-24.
- Indrayani, L. (2020). Makna literasi keuangan dalam keberlangsungan usaha industri rumah tangga perempuan Bali. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 407-428.
- Iswardoyo, J. (2019). Potensi Pengembangan Industri Pertambangan Berwawasan Lingkungan Studi Kasus: Sungai Unda, Bali, Indonesia. *Prosiding SENIATI*, 1-6.
- Januarsa, I. N., & Luthfi, O. M. (2017). Community Based Coastal Conservation In Buleleng, Bali Konservasi Pantai Berbasis Masyarakat Di Buleleng, Bali. *Ecsofim Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*, 4(02), 166-173.
- Miles, B and Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Rohendi Rohedi. Jakarta; UI-Press.
- Rochani, A. (2017, August). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mewujudkan Kota Cerdas. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dalam Pengembangan SmartCity* (Vol. 1, No. 1).
- Suastini, K. E., & Dewi, P. E. D. M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Ukuran Usaha Terhadap Pemahaman Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(3).
- Sugiyono., (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadi. (2011). *Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila*. Bandung: Widaya Aksara Press

- Putri, N. L. P. T. I., & Citra, I. P. A. (2018). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(1).
- Utomo, A. P. (2016). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4), 1-365.
- Wiguna, I. M. D. P. D., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Yeny, N. P., Atmadja, A. T., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2017). Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Kolektif Organisasi Berlandaskan Kearifan Budaya Lokal Sareng Nunas Lantur Kerahayuan (Studi Kasus Pada Subak Abian Gunung Merta Sari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

ANALISIS DIGITALISASI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN BULELENG

**Nengah Suarmanayasa¹, I Nengah Suastika²,
A. A. Istri Dewi Adhi Utami³, Luh Sri Eka Sari⁴**

**Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan
Ganesha, Indonesia¹²³, Balitbang Inovda Buleleng⁴**

Email: nengah.suastika@undiksha.ac.id¹, dhi.utami@undiksha.ac.id³
luhsrieka1980@gmail.com⁴

Abstrak

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model kebijakan digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah; (1) memformulasi profil usaha yang relevan dengan kebutuhan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, (2) memformulasi transformasi digitalisasi yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, (3) memformulasi kemasan produk yang relevan dengan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, (4) menganalisis keterampilan IT yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk dapat melakukan pemasaran secara online, dan (5) memformulasi model kebijakan digitalisasi UMKM di Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan (*research and development*) model siklus interaktif, dengan fase sebagai berikut: (1) analisis kebutuhan melalui studi pustaka dan studi empirik kondisi dan kebutuhan IT UMKM saat ini dan (2) pengembangan profil usaha, kemasan produk dan model kebijakan digitalisasi UMKM, uji ahli serta *focus group discussion*. Secara skematis, penelitian ini akan diawali dengan analisis kebutuhan yang meliputi beberapa langkah yaitu: (1) Mengumpulkan berbagai dokumen tertulis mengenai UMKM dan kemampuan IT pelaku UMKM, dan (2) studi empirik mengenai penguasaan dan kebutuhan IT pelaku UMKM. Adapun hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan proses digitalisasi kegiatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng terkendala dengan transformasi dan keterampilan digital pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng belum memiliki profil usaha yang memuat secara rinci mengenai gambaran umum usaha dan profil produk yang akan dipasarkan. Disisi lain belum semua pelaku usaha mikro dan kecil menggunakan teknologi informasi dalam menunjang operasionalisasi usaha

termasuk juga dalam melakukan promosi dan penjualan. Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng masih melakukan promosi dan penjualan secara konvensional. Hanya beberapa persen usaha mikro dan kecil saja yang melakukan promosi dan penjualan melalui media sosial.

Kata kunci: profil usaha, digitalisasi, pelaku usaha.

Abstract

The existence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) cannot be eliminated or avoided from today's nation's society. This study aims to produce a policy model for digitizing MSMEs in Buleleng Regency. In particular, the aims of this research are; (1) formulating business profiles that are relevant to the needs of MSMEs in Buleleng Regency, (2) formulating digitalization transformation that is relevant to the needs of MSME actors in Buleleng Regency, (3) formulating product packaging that is relevant to MSMEs in Buleleng Regency, (4) analyzing the IT skills needed by MSME actors to be able to carry out online marketing, and (5) formulating a MSME digitization policy model in Buleleng Regency. The method used is an interactive research and development cycle model, with the following phases: (1) analysis of needs through literature studies and empirical studies of the current conditions and needs of MSME IT and (2) development of business profiles, product packaging and models MSME digitalization policy, expert testing and focus group discussions. Schematically, this research will begin with a needs analysis which includes several steps, namely: (1) Collecting various written documents regarding MSMEs and IT capabilities of MSME actors, and (2) empirical studies regarding IT mastery and needs of MSME actors. The findings from this study indicate that the process of digitizing micro and small business activities in Buleleng Regency is constrained by the transformation and digital skills of micro and small business actors. Most micro and small business actors in Buleleng Regency do not yet have a business profile that contains a detailed general description of the business and product profiles to be marketed. On the other hand, not all micro and small businesses use information technology to support business operations, including promotion and sales. Most of the micro and small businesses in Buleleng Regency still carry out conventional promotions and sales. Only a few percent of micro and small businesses carry out promotions and sales through social media.

Keywords: business profile, digitization, business actor.

PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang sangat terpuuk oleh pandemi Covid-19 adalah UMKM, yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Hasil penelitian tahun 2020 menunjukkan secara umum semua UMKM terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung (Suarmanayasa dan Suastika, 2020). Namun sebesar 45,71% UMKM tidak mengalami permasalahan akibat Covid-19. Adapun UMKM yang tidak mengalami permasalahan tersebut, adalah UMKM yang bergerak dibidang kesehatan, makanan dan pengolahan pangan. Hal ini menunjukkan, dimasa Covid-19 masyarakat tetap membutuhkan makanan untuk meningkatkan imun tubuh dan alat-alat kesehatan. Bahkan industri makanan di masa Covid-19 menjadi barang yang paling dicari oleh masyarakat untuk bekal di rumah (*work form home*). Demikian juga dengan alat-alat kesehatan, sempat mengalami lonjakan permintaan dan lonjakan harga. Hal ini disebabkan karena adanya rumor beberapa alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alkohol dan lainnya akan langka di pasaran. Akibatnya semua masyarakat memborong alat-alat kesehatan yang ada di pasaran, yang mengakibatkan kelangkaan barang dan terjadinya kenaikan harga. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena pemerintah mampu menegggkakan dan membuat kebijakan yang pro terhadap penyediaan alat-alat kesehatan bagi masyarakat, bahkan memberikan sumbangan secara gratis.

Penelitian juga menunjukkan terjadinya penurunan penjualan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Adapun data mengenai penurunan penjualan UMKM di Kabupaten Buleleng dapat disajikan sebagai berikut:

Test Statistics^a

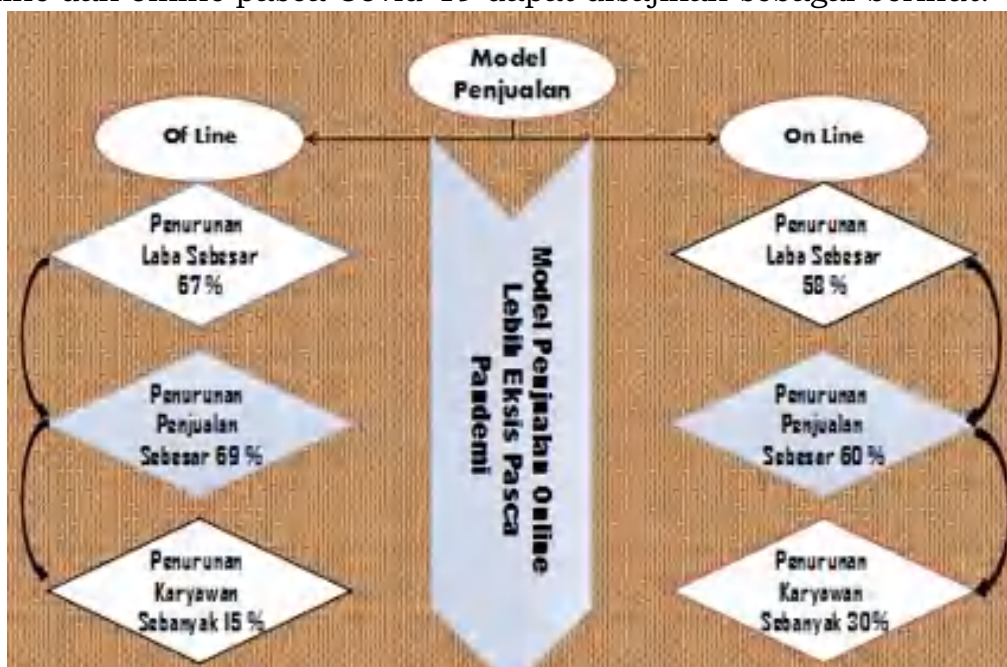
	Saat adanya Covid-19 - Sebelum adanya Covid-19
Z	-4.783 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Gambar 1.1. Data Penurunan Penjualan Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pada analisis data di atas, dapat diketahui bahwa penurunan penjualan UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 61%. Penurunan penjualan pada UMKM di masa Covid 19 berkisar dari 0%, hingga 90%. Hasil kajian juga menunjukkan antara UMKM yang melakukan pemasaran online dengan pemasaran offline mengalami dampak yang berbeda. Secara umum penjualan yang dilakukan secara online lebih tangguh dalam penjualan dan laba. Namun dalam pengurangan karyawan UMKM yang menggunakan model penjualan secara online lebih tinggi. Adapun data mengenai UMKM yang melalui online dan offline pasca Covid-19 dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Data UMKM yang Melakukan Pemasaran Nnline dan Offline Pasca Covid-19

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM yang melakukan pemasaran secara offline mengalami penurunan laba sebesar 67%, sedangkan UMKM yang melakukan pemasaran secara online mengalami penurunan laba sebesar 58%. Artinya UMKM yang telah menggunakan pemasaran secara online lebih tahan dibandingkan dengan offline dalam bidang laba dengan selisih sebesar 9%. Data di atas juga menunjukkan bahwa UMKM yang melakukan pemasaran secara offline mengalami penurunan penjualan sebesar 69%, sedangkan UMKM yang melakukan pemasaran secara online mengalami penurunan laba sebesar 60%. Artinya UMKM yang telah menggunakan pemasaran secara online lebih tahan dibandingkan dengan offline dalam penjualan dengan selisih sebesar 9%. Sedangkan berkaitan dengan penurunan karyawan, UMKM yang melakukan pemasaran secara offline mengalami penurunan karyawan sebesar 15%, sedangkan UMKM yang melakukan pemasaran secara online mengalami penurunan karyawan sebesar 30% . Artinya UMKM yang

telah menggunakan pemasaran secara online lebih besar pengurangan karyawannya dibandingkan dengan offline dengan selisih sebesar 15%..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2010). Metode kualitatif terutama digunakan untuk menganalisis profil UMK, model transformasi digitalisasi UMK dan perumusan kebijakan digitalisasi UMK di Kabupaten Buleleng (Miles dan Huberman, 1992). Sedangkan metode penelitian kuantitatif terutama digunakan untuk menganalisis urgensi profil usaha, keterampilan IT UMK dan pengemasan produk UMK di Kabupaten Buleleng (Sugiyono, 2010). Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen *focus group discussion* dan kuesioner. Instrumen penelitiannya adalah pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, pedoman *focus group discussion* dan kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Instrumen pedoman wawancara terstruktur, pedoman *focus group discussion* dan kuesioner memuat tentang berbagai pertanyaan bertalian dengan masalah penelitian. Sedangkan pedoman studi dokumen memuat tentang catatan nama dokumen, tahun dokumen, pengarang/pembuat dokumen, dan isi dokumen. Pengembangan instrumen diawali dengan perumusan konsep, pembuatan kisi-kisi, pembuatan instrumen, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji judges, dan revisi instrumen (Sugiyono, 2010; Creswell, J. W., 2008). Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Buleleng

Profil perusahaan adalah gambaran umum mengenai diri suatu perusahaan yang hendak melakukan serangkaian promosi terpadu melalui sebuah buku atau media lainnya. Profil perusahaan adalah deskripsi ringkas suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas serta fokus kerja dari satu perusahaan. Biasanya, [profil perusahaan](#) (*company profil*) dibutuhkan saat perusahaan akan mengajukan penawaran atau investasi kepada calon pembeli, investor maupun kerjasama dengan mitra strategis bisnis. Dengan adanya profil perusahaan ini akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai sebuah perusahaan dengan begitu informasi miring atau ketidaktahuan masyarakat dapat diluruskan melalui profil perusahaan. Selain bagi masyarakat, profil perusahaan ini dapat dibuat untuk konsumen, pemasok, mitra kerja, bank, hingga bahkan pemerintah. Oleh sebab itu, dalam membuat profil perusahaan perlu memasukkan poin penting apa saja yang ingin disampaikan secara terbuka kepada publik. Secara sederhana profil usaha memuat tentang nama

perusahaan, lokasi perusahaan, nomor telepon, e-mail, website, logo dan pemrakarsa.

Berdasarkan pada data tampak sebanyak 49% usaha mikro dan kecil memiliki profil usaha yang menggambarkan tentang usaha yang dijalankan. Sebesar 47% usaha mikro dan kecil tidak memiliki profil usaha yang dijadikan sebagai gambaran mengenai usaha yang dijalankan. Sebanyak 4% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak mengetahui apa itu profil usaha. Data ini juga menunjukkan, sebanyak 51% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng belum memiliki profil usaha yang disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam membuat profil usaha. Kondisi ini menggambarkan pengetahuan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memahami usaha yang dijalankan dan keberlanjutan usahanya. Usaha mikro dan kecil yang memiliki profil usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, karena adanya gambaran usaha yang dapat dijadikan pertimbangan oleh instansi lainnya dalam menjalin kemitraan. Berdasarkan pada analisis yang dilakukan pada usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng yang memiliki profil usaha dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut:



Gambar 2.1. Diagram Lingkaran Kepemilikan Profil Usaha

Profil perusahaan memuat 2 hal yaitu **corporate value** dan **product value**. *Corporate value* adalah penjelasan terkait dengan nilai-nilai perusahaan, seperti: (1) sejarah berdirinya perusahaan yang berisi tentang bagaimana proses perkembangan perusahaan, asal mula, pendiri, tanggal berdirinya, (2) visi dan misi perusahaan (target dan cita-cita perusahaan) yang berisi harapan jangka panjang perusahaan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, (3) struktur organisasi yang berisi jabatan yang ada dalam suatu perusahaan, bisa berupa skema dengan sistem hirarki horizontal dan vertikal, (4) kinerja perusahaan yang berisi

pengalaman pekerjaan terdahulu yang bisa dibuat dengan visual grafik agar memudahkan pembaca serta dapat ditambahkan laporan keuangan perusahaan jika dibutuhkan, (5) arah kebijakan menuangkan beberapa regulasi yang menjadi pedoman perusahaan hingga kebijakan kelangsungan keamanan karyawan, kesehatan, dan lingkungan, dan (6) prestasi atau pencapaian perusahaan yang berisi penghargaan, sertifikat perusahaan, hingga program sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Adapun usaha mikro dan kecil yang memiliki profil usaha yang menggambarkan gambaran umum usaha yang dijalankan di Kabupaten Buleleng dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut:



Gambar 2.2. Diagram Lingkaran Gambaran Umum Usaha

Berdasarkan pada data di atas tampak sebanyak 47% usaha mikro dan menengah di Kabupaten Buleleng memberikan gambaran umum mengenai usaha yang dijalankan dalam profil usaha. Sebesar 34% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak menggambarkan gambaran umum usaha yang dijalankan dalam profil usahanya. Sebanyak 19% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak mengetahui apakah profil usaha yang dibuat memuat gambaran usaha yang dijalankan atau tidak. Data ini juga menunjukkan, masih kiranya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam membuat gambaran umum usaha yang dijalankan pada profil usahanya.

Sedangkan *Product value* adalah penjelasan mengenai nilai produk/ servis yang dihasilkan dari usaha. *Product value* ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) kebijakan mutu yang dilakukan perusahaan,

kualitas produksi, hingga bahan yang lebih unggul dibandingkan dengan produk lain, (2) harga yang berisi penjelasan bagaimana produk tersebut terdistribusi hingga ke konsumen, (3) menerangkan kriteria SDM secara umum yang ada di perusahaan, (4) menerangkan proses produksi secara garis besar dari awal hingga penyimpanan, (5) tampilan fisik produk hingga fasilitas pendukung dalam menjual produk. Pada usaha mikro dan kecil profil usaha tidaklah ditujukan untuk menarik minat investor untuk menginvestasikan uangnya pada usaha yang dibuat, namun lebih banyak ditujukan untuk menarik masyarakat untuk membeli produk yang dijual. Bertalian dengan itu, maka profil usaha kecil dan menengah cukup mencantumkan gambaran perusahaan secara umum dan produk yang dihasilkan. Untuk mempermudah konsumen dalam memilih produk, harga dan memesan produk yang hendak dibeli biasanya usaha mikro dan kecil akan menampilkan gambar produk, harga produk, komposisi produk dan cara pembelian produk.

Berdasarkan pada data penelitian tampak sebanyak 48% usaha mikro dan menengah di Kabupaten Buleleng memberikan gambaran nilai produk usaha yang dijalankan dalam profil usaha. Sebesar 25% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak menggambarkan nilai produk usaha yang dijalankan dalam profil usahanya. Sebanyak 27% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak mengetahui apakah profil usaha yang dibuat memuat gambaran nilai produk usaha yang dijalankan atau tidak. Data ini juga menunjukkan, masih kiranya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam membuat *product value* usaha yang dijalankan pada profil usahanya. Adapun usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng yang memiliki profil usaha yang menggambarkan nilai produk usaha yang dijalankan dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut:



Gambar 2.3. Diagram Lingkaran Gambaran *product value*

2. Kebutuhan Profil Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Buleleng

Profil usaha yang dimiliki oleh usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng ada yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha, ada yang dibuatkan oleh orang lain. Pengusaha yang memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat profil usahanya secara mandiri. Sedangkan pengusaha yang tidak memiliki keterampilan dalam membuat profil usaha meminta pada orang lain untuk membuatnya. Beberapa usaha mikro dan menengah profil usahanya dibuatkan oleh karyawan yang memiliki pengalaman bekerja di bidang usaha tersebut. Adapun gambaran usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng yang profil usahanya dibuat secara mandiri dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut:



Gambar 2.4. Diagram Lingkaran Pembuat Profil Usaha

Berdasarkan pada data di atas tampak sebanyak 47% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng membuat profil usahanya secara mandiri. Sebesar 15% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng profil usahanya dibuatkan oleh orang lain. Sebanyak 38% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak mengetahui apakah profil usahanya dibuat sendiri atau dibuatkan orang lain. Hal ini disebabkan karena usaha yang dijalankan telah berlangsung lama. Bahkan telah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang membuat profil usahanya. Ditanya mengenai apakah profil usaha penting untuk meningkatkan penjualan produk? Hampir semua pengusaha menyetujui, bahwa profil usaha sangat penting untuk mengenalkan usaha yang dijalankan dan mengenalkan produk dari usahanya. Adapun gambaran pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng yang menilai profil usaha penting untuk meningkatkan penjualan produk dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5. Diagram Lingkaran Pentingnya Profil Usaha

Berdasarkan pada data di atas tampak sebanyak 76% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng menilai profil usaha penting untuk dibuat demi kemajuan usaha. Hal ini disebabkan profil usaha dapat menjadi tanda pengenal atau icon sekaligus menjadi informasi yang sangat efektif untuk mengenali produk yang dihasilkan serta kebermanfaatannya bagi konsumen. Profil usaha akan diwariskan secara turun-temurun pada penerus usaha, demikian juga dengan labeling terhadap usaha yang dijalankan. Kondisi ini akan menjadi semacam memori jangka Panjang pada konsumen-konsumen yang telah mengetahui kualitas produk dan keunggulan produk yang dihasilkan. Hanya sebesar 3% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng yang menilai tidak penting untuk membuat profil usaha untuk kemajuan usaha yang dijalankan. Sebanyak 21% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak mengetahui apakah profil usaha mampu meningkatkan penjualan atau memajukan usaha.

SIMPULAN

Sebanyak 49% usaha mikro dan kecil memiliki profil usaha yang menggambarkan tentang usaha yang dijalankan. Sebanyak 51% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng belum memiliki profil usaha yang disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam membuat profil usaha. Sebanyak 53% usaha mikro dan menengah di Kabupaten Buleleng tidak memberikan gambaran umum mengenai usaha yang dijalankan dalam profil usaha. Sebanyak 52% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak mencantumkan gambaran nilai produk usaha yang dijalankan dalam profil usaha. Hal ini menunjukkan, masih kiranya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam membuat gambaran umum usaha dan nilai produk usaha yang dijalankan pada profil usahanya. Data menunjukkan sebanyak 53% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng tidak membuat profil usahanya secara mandiri. Namun sebanyak 76% pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Buleleng menilai profil usaha penting untuk dibuat demi kemajuan usaha. Hal ini disebabkan profil usaha

dapat menjadi tanda pengenal atau icon sekaligus menjadi informasi yang sangat efektif untuk mengenali produk yang dihasilkan serta kebermanfaatannya bagi konsumen. Profil usaha akan diwariskan secara turun-temurun pada penerus usaha, demikian juga dengan labeling terhadap usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N. (2013). Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 48-54.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123-131.
- Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Bahri, Arsad. (2019). Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2019*
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Bali Maret 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juni 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Pertumbuhan Ekonomi Bali Semester I-2020
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson
- Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. *LP2M*.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Hamid, Edy Suandi. (2010). Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif*.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.

- Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian Ntb. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(11), 3497-3508.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Motode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *POINT*, 2(1).
- Sugiyono., (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

MEREKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULELENG MENUJU DIGITALISASI SATUAN PENDIDIKAN

**I Nengah Suastika¹, A. A. Istri Dewi Adhi Utami²,
I Wayan Budiarta³, Ketut Arsudipta⁴.**

**Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas
Pendidikan Ganesha, Indonesia¹²³, Balitbang Inovda⁴**

nengah.suastika@undiksha.ac.id¹,
dhi.utami@undiksha.ac.id², arsudipta1977@gmail.com⁴

Abstrak

Hampir semua sektor di era industry 5.0 ini sudah melakukan digitalisasi. Yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Hal itu juga yang dilakukan di sektor pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembelajaran online pendidikan dasar di Kabupaten Buleleng. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan pendidikan (Borg and Gall, 1989). Tahapan penelitian ini diawali dengan kegiatan *define*, *design*, dan *development*. Pada *define* dilakukan analisis kebutuhan melalui studi pustaka dan studi empirik mengenai praktik pembelajaran digital di Kabupaten Buleleng pasca Covid-19. Tahap *design* dirancang prototipe model kebijakan pendidikan pasca Covid-19 dan uji *expert* terhadap prototipe. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket, studi dokumen, wawancara, tes dan *focus group discussion*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa proses pembelajaran online pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng telah disertai dengan kebijakan dari daerah dan diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Bentuk pembelajaran digital yang ditempuh oleh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng lebih banyak semi pembelajaran daring atau online dan offline. Pelaksanaan pembelajaran online masih menyisakan berbagai persoalan bagi guru, khususnya dalam mengaplikasikan learning management system yang menjadi media untuk melakukan pembelajaran

secara asinkronus. Belum banyak guru yang mengisi materi, memberikan petunjuk belajar, mengisi media pembelajaran dan melakukan evaluasi secara digital pada learning management system. Siswa juga mengalami kendala dalam mengaplikasikan learning management system dan ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran online.

Kata kunci: implementasi; kebijakan; online

Abstract

Almost all sectors in the industrial 5.0 era have digitized. Namely by utilizing the sophistication of information technology. The same is true in the education sector. This research aimed at analyzing basic education online learning policies in Buleleng Regency. Methodologically, this research used educational research and development methods (Borg and Gall, 1989). The stages of this research started with define, design, and development activities. The define was done with a need analysis through literature and empirical studies regarding digital learning practices in Buleleng Regency, digital learning problems, and post-Covid-19 learning needs. The design was designed by a protective model for post-Covid-19 education policies and an expert test for protection. The data collection techniques were gained by questionnaires, document studies, interviews, tests and focus group discussions. The data analysis techniques used were qualitative and quantitative data analysis. The result showed that the online learning process in elementary and junior high schools in Buleleng Regency has been accompanied by policies from the regions and followed by policies issued by schools. The form of digital learning in elementary and junior high schools in Buleleng Regency was mostly semi-online or online and offline learning. The implementation of online learning still left various problems for teachers, especially in applying the learning management system which was as a medium for conducting asynchronous learning. There were not many teachers who filled out materials, provided study instructions, filled out learning media and conducted digital evaluations on the learning management system. The students also experienced problems in applying the learning management system and the availability of the infrastructure needed in online learning.

Keywords: implementation; policies; online.

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 telah merubah semua tatanan kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan proses tatap muka langsung, kini mesti digantikan dengan proses pembelajaran dalam jaringan (Daring). Proses pembelajaran Daring atau juga dikenal dengan pembelajaran digital membutuhkan berbagai sarana prasarana, kesiapan dari guru, sekolah, siswa dan orang tua siswa. Hal ini disebabkan karena sistem pembelajaran digital mewajibkan setiap guru dan siswa mesti memiliki akses internet, *handphone* android dan kemampuan untuk menggunakan berbagai aplikasinya untuk pembelajaran (Łukasz Tomczyk, 2020) . Secara kasat mata, kondisi ini tidak menjadi persoalan karena hampir semua guru, siswa dan orang tua siswa telah memiliki *handphone* android yang dapat digunakan untuk mengikuti dan melangsungkan proses pembelajaran (Rhenal Kasali, 20017). Akan tetapi, keadaan ini tidak sepenuhnya didukung dengan kemampuan penggunaan teknologi informasi pembelajaran oleh guru, siswa, termasuk juga orang tua siswa dalam membantu anaknya. *Handphone* android selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi ringan, mengunggah video dan foto, serta kegiatan sosial lainnya yang tidak secara langsung mengerah pada praktik pembelajaran. Implikasinya, belum semua guru, siswa dan orang tua siswa memahami pemanfaatan *handphone* android dan aplikasinya untuk kegiatan proses belajar mengajar (Antonia Hyman, et al. 2020) .

Berbagai inovasi untuk mengatasi persoalan ini telah dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan guru penggerak, memberikan pulsa gratis pada guru dan siswa untuk membeli paket internet, memberikan pelatihan secara online kepada guru, mengadakan kopetisi pembelajaran digital, kompetisi pembuatan konten materi digital, serta kegiatan lainnya. Sebagian besar guru bahkan telah melangsungkan pembelajaran digital dengan berbagai *platform* yang disediakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan seperti rumah belajar, meja kita, icando, IndonesiaX, *goole for education*, kelas pintar, microsoft office 365, *quipper school*, ruang guru, sekolahmu, zenius, dan cisco webex (Nana dan Endang Surahman, 2019; Dirjendikti, 2020). Selain itu guru juga secara mandiri menggunakan berbagai aplikasi seperti *zoom*, *goole meet*, *goole clasrom*, *whatsaap*, *instagram*, *facebook* dan berbagai media berbasis online lainnya. Penggunaan berbagai *platform* ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kesempatan, pengetahuan dan pengalaman untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Demikian juga dengan proses evaluasi dilakukan secara digital dengan memberikan tes, proyek, studi kasus, percobaan yang hasilnya mesti dikirim dalam bentuk video atau foto oleh siswa kepada guru. Mengatasi kendala jaringan internet, para guru juga melakukan pembelajaran langsung (*luring*) pada beberapa siswa dengan cara datang langsung ke rumah siswa (Suastika, I. N. 2020) .

METODE

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan pendidikan (*Educational Research and Development*). Pengembangan produk pendidikan dalam penelitian ini adalah berupa draf rencana tindak lanjut kebijakan digitalisasi pendidikan dasar di Kabupaten Buleleng (Borg, W. R. and M. D. Gall, 1989; Creswell, J. W., 2008). Ada empat teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian tahap pertama dan kedua (*define* dan *design*) ini, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, kuesioner, dan observasi. Untuk studi dokumen, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman dan format studi/analisis dokumen. Untuk studi melalui wawancara mendalam, peneliti mengembangkan pedoman wawancara secara mendalam yang tidak terstruktur (Spradley, 1980). Untuk kuesioner, instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk mengetahui masalah-masalah dalam pembelajaran digital. Sedangkan untuk observasi, peneliti mengembangkan pedoman observasi tidak terstruktur berkaitan dengan berbagai aktivitas pembelajaran digital dan pembelajaran luring (Creswell, J. W., 2008; Sugiyono, 2010). Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis sumber dan data yang diperoleh. Untuk analisis data tahap *define* dan *design* dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pembelajaran Online

Kehidupan kita pada abad 21 sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kecanggihan TIK telah membuat arus pertukaran informasi menjadi sangat cepat, dan komunikasi menjadi seolah-olah tanpa batasan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan bahwa dampak perkembangan TIK ini terjadi pada seluruh aspek kehidupan kita termasuk aspek pendidikan. Pendidikan sekarang tidak lagi sesuatu yang eksklusif bagi golongan tertentu saja, melainkan sudah lebih dapat diakses. TIK telah membuka sekat-sekat yang dahulu menghalangi akses, dan telah dapat memfasilitasi penyampaian dan sekaligus penyerapan ilmu pengetahuan. TIK juga telah membuka akses terhadap ilmu pengetahuan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan pada era teknologi sebelumnya. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan telah sangat maju dan sekarang ini tersedia banyak alternatif cara untuk memberikan akses, pemerataan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran yang ada. Pembelajaran *Online* merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi berbasis Internet yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pembelajaran.

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia-manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejaran target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi. Namun, persebaran virus Corona (Covid-19) yang

menjadi krisis besar manusia modern, memaksa kita untuk sejenak bernafas, berhenti dari pusaran sistem, serta melihat kembali kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia dipaksa 'berhenti' dari rutinitasnya, untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan Covid-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, saya konsentrasi pada aspek pendidikan, yang esensial untuk didiskusikan. Aspek pendidikan menjadi konsentrasi penulis, karena telah berpuluh tahun bergelut di bidang ini dalam kapasitas sebagai peneliti, praktisi hingga perumus kebijakan. Pandemi Covid-19 memaksa kebijakan social distancing, atau di Indonesia lebih dikenalkan sebagai physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk meminimalisir persebaran Covid-19. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus Corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merespon dengan kebijakan belajar dari rumah, melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan Ujian Nasional untuk tahun ini. Persebaran virus Corona yang massif di berbagai negara, memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik hingga pendidikan di tengah krisis akibat Covid-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 milyar anak usia sekolah yang terdampak Covid 19 di 188 negara termasuk 60 jutaan diantaranya ada di negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelangngan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya: (1) ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah, (2) keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran, (3) keterbatasan sumberdaya untuk pemanfaatan teknologi Pendidikan seperti internet dan kuota, (4) relasi guru-murid-orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral.

Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba, tidak jarang membuat pendidik dan siswa kaget termasuk orang tua bahkan semua orang yang berada dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi Covid-19, membuat kaget hampir di semua lini, dari kabupaten/kota, provinsi, pusat bahkan dunia internasional. Sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespon surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan sekolah untuk memberlakukan

pembelajaran dari rumah. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sementara, orang tua murid merasa stress ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan masing-masing di tengah krisis. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita khususnya terkait pembelajaran daring: Pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Memang jumlahnya sangat banyak, untuk memastikan sekitar 3 jutaan guru di Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi tentu bukan perkara mudah. kompetensi minimal TIK guru level 2 harus segera diwujudkan termasuk kemampuan melakukan vicon (video conference) dan membuat bahan ajar online. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi TIK guru yang ideal berdasarkan Teacher ICT Competencies Framework oleh UNESCO. Level tertinggi adalah level 4 dimana guru sudah mampu menjadi trainer bagi guru yang lain. Jika kompetensi guru sudah level 2, maka guru akan mampu menyiapkan sistem belajar, silabus dan metode pembelajaran dengan pola belajar digital atau online. Pemerintah tidak harus sendiri, upaya menggandeng banyak pihak penyedia portal daring sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun leading sektor urusan kebijakan pembelajaran daring harus dikendalikan dibawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, pemakaian teknologipun juga tidak asal-asalan, ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan Pendidikan yakni teknologi Pendidikan (TP). Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital, dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif, dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara

khusus. Prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi yaitu mampu menghadirkan fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas, memberikan ilustrasi fenomena alam dan ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa-guru dan siswa-siswa, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Namun sangat sedikit guru yang memahami prinsip-prinsip diatas. Hal ini menuntut stakeholder terkahit utamanya para Pengembang Teknologi Pembelajaran harus lebih banyak berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti Covid-19 saat ini.

Ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru membiasakan mengajar online. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Ke depan, harus ada kebijakan perubahan sistem untuk pemberlakuan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Inisiatif kementerian menyiapkan portal pembelajaran daring Rumah Belajar patut didukung meskipun urusan daring saat covid 19 yang memaksa siswa dan guru menjalankan aktifitas di rumah tetap perlu dukungan penyedia layanan daring yang ada di Indonesia.

Empat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yg harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference. Keberadaan perangkat minimal yang harus dimiliki guru sangat perlu dipikirkan Bersama baik pemerintah kab/kota, provinsi dan pusat termasuk orang tua untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sudah banyak fintech yang bergerak dibidang pemberian bantuan pengadaan perangkat teknologi baik untuk siswa, guru maupun sekolah.

lima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidthnya juga harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun infrastruktur komunikasi Palapa Ring yang diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2019 menjadi tulang punggung infrastruktur digital dari Aceh hingga Papua. Tapi, jangkauan akses harus diperluas agar sebanyak mungkin sekolah, pendidik dan siswa merasakan manfaatnya. Pandemi Covid-19 memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran Virus Corona yang cepat, mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari Covid-19 ini, yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga.

Kebijakan Pembelajaran Online Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng

Kelima isu penting diatas akan menjadi penentu seberapa cepat kita akan mampu meratakan kurva kecemasan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan kita semua. Di tengah pandemi Covid-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreatifitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Adapun data penerapan pembelajaran online pendidikan dasar di Kabupaten Buleleng saat pandemic covid-19 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Data Pembelajaran Onlie Pendidikan Dasar

Berdasarkan pada data di atas, sebanyak 98% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng menerapkan pembelajaran online. Ini artinya sebagian besar sekolah telah memiliki kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Sebanyak 2% sekolah tidak menerapkan pembelajaran online. Hal ini disebabkan pada daerah tersebut tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran secara online. Pertama karena belum dimilikinya perangkat teknologi seperti personal computer, laptop atau hanphone android oleh siswa. Kedua, pada daerah tersebut tidak memiliki jaringan internet yang memadai, sehingga menyulitkan proses pembelajaran secara online. Ketiga, pada daerah tersebut siswanya masih terisolir dari keramaian, sehingga covid-19 tidak sampai merabab yang memungkinkan terjadinya pembelajaran tatap muka. Ketika ditanya mengenai adanya kebijakan sekolah bertalian dengan pembelajaran online?. Sebanyak 97% sekolah menyatakan memiliki kebijakan mengenai pembelajaran online di sekolahnya. Hanya 3% sekolah yang menyatakan tidak memiliki kebijakan pembelajaran online. Ini artinya, pembelajaran digital yang menjadi program pemerintah didukung penuh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Adapun data adanya kebijakan pembelajaran online pada

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Data Pembelajaran Onlie Pendidikan Dasar

Ditinjau dari sifat kebijakan pembelajaran online yang diterapkan di sekolah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pembelajaran online penuh, online dan offline, serta offline penuh. Pembelajaran online penuh adalah pembelajaran yang menggunakan digital untuk setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan pembelajaran yang bersifat semi online atau online offline adalah pembelajaran yang menggunakan online setengah dan sisanya mempergunakan pembelajaran luring atau tatap muka langsung. Pembelajaran offline penuh adalah pembelajaran yang sepenuhnya bersifat luring atau tatap muka langsung. Adapun data mengenai sifat kebijakan pembelajaran online yang diterapkan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng dapat disajikan dalam tabel berikut:



Gambar 3.3. Data Sifat Pembelajaran Onlie Pendidikan Dasar

Berdasarkan data di atas, sebanyak 30% sekolah menerapkan pembelajaran yang bersifat online penuh. Sekolah-sekolah ini telah memiliki kesiapan teknologi yang memadai, seperti ketersediaan sarana prasarana, kesiapan tenaga informasi teknologi, kesiapan pelaksana pendidikan dan kesiapan siswa. Karena telah memiliki kesiapan yang memadai pembelajaran bersifat online penuh dengan menggunakan pembelajaran yang bersifat sinkronus dan asinkronus. Sebanyak 69% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng menerapkan pembelajaran yang bersifat offline dan online. Hal ini disebabkan karena belum semua komponen pendidikan memiliki kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran online penuh. Misalnya masih kurangnya perangkat teknologi yang dimiliki oleh siswa atau guru, kurangnya keterampilan teknologi guru, kurangnya keterampilan teknologi siswa, dan kurangnya tim teknologi informasi yang dimiliki sekolah. Kelemahan ini kemudian diatasi dengan cara menggunakan pembelajaran yang bersifat online dan offline, sehingga mampu menutupi kekurangan online dan mampu melakukan *social distancing* sesuai ketentuan yang diberlakukan pemerintah. Sebanyak 1% tidak mengetahui apakah pembelajaran dilakukan dengan online penuh apa semi online. Ketika ditanya mengenai, apakah kebijakan online disertai dengan penyiapan sarana prasarana di sekolah?. Sebanyak 90 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng menyatakan kebijakan pembelajaran online disertai dengan penyiapan sarana prasarana sekolah. Sebanyak 9% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng menyatakan kebijakan pembelajaran online tidak disertai dengan penyiapan sarana prasarana sekolah.



Gambar 2.4. Data Sifat Pembelajaran Onlie Pendidikan Dasar

Kesuksesan digitalisasi dalam pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan tim teknologi informasi. Teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari *hardware* dan *software* untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sedangkan tim tekonologi informasi adalah tenaga kependidikan yang memmiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan

yang memadai dalam mengoprasionalisasikan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Adapun data mengenai tim teknologi informasi yang dimiliki oleh Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.5. Data Tim TI pada Pendidikan Dasar

Berdasarkan data di atas, tampak sebanyak 65% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng telah memiliki tim teknologi informasi yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran digital. Sebanyak 34% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng tidak memiliki tim teknologi informasi. Ketika guru-guru mengalami permasalahan dalam melaksanakan pembelajaran online atau digital, tidak ada tim teknologi informasi di sekolah yang membantu. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran menjadi terganggu, karena para guru akan meminta bantuan guru lainnya yang memiliki keterampilan teknologi lebih bagus untuk mengatasi permasalahannya. Sebanyak 1% guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng tidak mengetahui apakah sekolahnya memiliki tim teknologi informasi atau tidak. Ketika ditanya, apakah sebaiknya pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara online atau offline?. Sebanyak 18% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng setuju untuk melaksanakan pembelajaran secara online atau digital. Hal ini disebabkan karena para guru dan siswa telah nyaman dan terbiasa dengan proses pembelajaran online. Sebanyak 81% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng setuju untuk melaksanakan pembelajaran secara offline. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang bersifat langsung dinilai lebih mudah dilaksanakan. Disisi lain pembelajaran yang bersifat langsung dianggap lebih mampu dalam memberikan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Guru bisa menjadi contoh dan tauladan dalam melaksanakan nilai-nilai karakter di sekolah dan masyarakat. Sebanyak 1% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng tidak menentukan apakah

pembelajaran dilaksanakan secara online atau secara offline. Adapun data mengenai pilihan guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng untuk offline dan online dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.6. Data Pilihan Online atau Offline Pendidikan Dasar

SIMPULAN

Proses pembelajaran online pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng telah disertai dengan kebijakan dari daerah dan diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Bentuk pembelajaran digital yang ditempuh oleh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng lebih banyak semi pembelajaran daring atau online dan offline. Sebanyak 98% Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng menerapkan pembelajaran online. Ini artinya sebagian besar sekolah telah memiliki kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Sebanyak 2% sekolah tidak menerapkan pembelajaran online. Pelaksanaan pembelajaran online masih menyisakan berbagai persoalan bagi guru, khususnya dalam mengaplikasikan learning management system yang menjadi media untuk melakukan pembelajaran secara asinkronus. Belum banyak guru yang mengisi materi, memberikan petunjuk belajar, mengisi media pembelajaran dan melakukan evaluasi secara digital pada learning management system. Siswa juga mengalami kendala dalam mengaplikasikan learning management system dan ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran online.

DAFTAR PUSTAKA

- Alice Chik and Phil Benson, (2020) Commentary: Digital language and learning in the time of coronavirus. *Journal Linguistics and Education*.
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0898589820301108?token=2B2F1D337A4209306ED708D30C7E22127468416B84D300D091894B75D327BC79A483625F5F44A46A5511971B70FF9292>
- Antonia Hyman, et al. (2020) Testing a school-based program to promote digital health literacy and healthy lifestyle behaviours in intermediate elementary students: The Learning for Life program. *Preventive Medicine Reports*, 19 (2020).
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2211335520301091?token=6CA0EC570613EBE00D941A26EFF91B26A2500DEAD997F812985314EE82C0601CEF7184C032272770EB2615C07A8D7FEC>
- Borg, W. R. and M. D. Gall. (1989). *Educational Research: An Introduction. Fifth Edition*. New York and London: Longman
- Benjamin Bowyer and Joseph Kahne. (2020) The digital dimensions of civic education: Assessing the effects of learning opportunities. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 69 (2020).
<https://pdf.sciencedirectassets.com/272075/1>
- Beth A. Brooks. (2020) *Being Smart About Social Media*.
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1541461220301853?token=E050C76620BC0E1EA3C5E101F9390C5F9A8181B6FC1173D5C1EE5421688334211F9D558214840F6BF7D71B9EEC330CB1>
- Creswell, J. W., 2008, *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson. [\[Google Scholar\]](#)
- Dorit Alt and Nirit Raichel, (2020) Enhancing perceived digital literacy skills and creative self-concept through gamified learning environments: Insights from a longitudinal study. *International Journal of Educational Research*, 101 (2020). <https://sci-hub.do/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035519315988>
- Delia Hillmayr et al. (2020) The potential of digital tools to enhance mathematics and science learning in secondary schools: A context-specific meta-analysis Delia Hillmayr. *Journal Computers & Education*, 153 (2020).
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360131520300968?token=3981A55C76624D9C59BEDFB52CC1E9ECC4D5D49F02D80BA99528EA15820071217943E7B4CFCAE93BE0EA5608B3369478>
- Dirjendikti. (2020) *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
<http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020?opwvc=1>

- Franklin Tchakounté, et al. (2020) A smart contract logic to reduce hoax propagation across social media. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*.
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1319157820304560?token=00EA2A3A830A7FE30693194FB97B8E4BEA7B31124B0B751C5E3A123723AC7C49897AD82BB87E144208814AE444A5BEA3>
- Greenhow, C. (2011). *Online social network and learning*. On the Horizon.
- Gianfranco Polizzi, (2020) Digital literacy and the national curriculum for England: Learning from how the experts engage with and evaluate online content. *Journal Computers & Education*, 152 (2020).
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360131520300592?token=ED62995D2AAB9271356DBE72D0EA8E7139423B7CB873676D34D65619523E448B21849B295DA42058A1A25BDCCFB8D26A>
- Igor Ivanov, (2020) Implementation of developmental education in the digital learning environment. *Procedia Computer Science* 172 (2020) 517–522.
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050920313910?token=68CB69B21CA22FE0C124529F7C4CAD2A8D2F3F91B0814A24C223814C4209ED918E564C46DD05793A13808AAB5CC6DFE1>
- Kemendikbud. (2020) *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
<https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-3-2020-standar-nasional-pendidikan-tinggi>
- Liping Sun, et al (2020). Primary school students' perceptions of scaffolding in digital game. *Journal Learning, Culture and Social Interaction*, 28 (2021).
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2210656120301288?token=99A5FF8490123A3AD32E2EC02BB838D80812494693FC8DA037B0AA2840E30E6E3E7F88FAD789984816653972B766F232>
- Lena-Christin Jaeger and Julia Hohler. (2020) Using word of mouth data from social media to identify asymmetric competition in food retailing. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58 (2021).
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0969698920312923?token=6335D1AD6855D631C6F2C062382D492DF72D1804F4B2D12B9A9981604D9740AA1B77E791A7E5A40C447D003E350F227E>
- Leo Beletsky, et al. (2020). Fentanyl panic goes viral: The spread of misinformation about overdose risk from casual contact with fentanyl in mainstream and social media. *International Journal of Drug Policy*, 86 (2020).
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0955395920302851>

[?token=AADD5265EF45494876B1A116D313D9D70EE1992DAC
DBAA55FCA00136C2B4455A0C0ECC457CFEC5679669ACD746
58BB41](https://pdf.sciencedirectassets.com/311593/1/DBAA55FCA00136C2B4455A0C0ECC457CFEC5679669ACD74658BB41?token=AADD5265EF45494876B1A116D313D9D70EE1992DAC)

- Łukasz Tomczyk. (2020) Digital literacy and e-learning experiences among the pre-service teachers data. *Data in Brief*, 32 (2020).
<https://pdf.sciencedirectassets.com/311593/1>
- Miles, B and Huberman, M., 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Rohendi Rohedi. Jakarta; UI-Press.
- Munir (2017) *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta.
http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI_ILMU_KOMPUTER/196603252001121-MUNIR/BUKU/Pembelajaran%20Digital.pdf



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I Nyoman Gede Remaja¹, I Nyoman Pande Sumertha²

Universitas Panji Sakti¹
Balitbang Inovda Buleleng²

email: nym.remaja@unipas.co.id¹, isumertha@gmail.com²

Abstak

Di Kabupaten Buleleng kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan narkotika tidak saja menjadi tanggungjawab kepolisian dan BNN tetapi juga tanggungjawab semua pihak, utamanya pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam Permendagri No. 12 Tahun 2019 dinyatakan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan fasilitasi P4GN. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kajian tentang permasalahan, implikasi, pertimbangan dan materi muatan dalam rancangan peraturan daerah melalui metode jenis penelitian hukum empiris. Hasil kajian; Praktik penyelenggaraan yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan P4GN oleh pemerintah daerah adalah SK Bupati No. 400/260/HK/2021. Kondisi yang terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng semakin meningkat yang didasarkan pada data yang ada. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah budaya minum minuman dan merokok semakin kuat, keengganan melaporkan kasus narkotika, kurangnya biaya, fungsi IPWL yang belum maksimal, regulasi belum mendukung, tahanan kasus narkotika menjadi satu dengan yang lain dan tidak adanya pengawasan terhadap mantan narapidana kasus narkotika. Landasan filosofis yang dipakai dalam kajian ini berupa: Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan Konsep Tri Hita Karana. Muatan materi yang diatur dalam peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi proses fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Buleleng bersih narkotika.

Kata Kunci: *Fasilitasi, P4GN, Kabupaten Buleleng*

Abstract

In Buleleng Regency, cases of narcotics abuse have increased quite significantly and are already in a very worrying condition. Narcotics crimes are not only the responsibility of the police and BNN, but also the responsibility of all parties, especially the local government and the community. In Permendagri No. 12 of 2019 stated that the Regional Government is obliged to carry out P4GN facilitation. Based on this, a study was carried out on the problems, implications, considerations and content material in the draft regional regulations through empirical legal research type methods. Study results; The implementation practice that has been used as the basis for the implementation of P4GN by local governments is the District Head's Decree No. 400/260/HK/2021. Based on the available data, the conditions for the abuse and distribution of narcotics in Buleleng Regency are increasing. The problems faced by the community are the culture of drinking and smoking is getting stronger, reluctance to report narcotics cases, lack of funds, IPWL's function is not optimal, regulations are not yet supportive, narcotics case detainees are one with another and there is no supervision of ex-convicts of narcotics cases. The philosophical foundations used in this study are: Pancasila, the Preamble to the 1945 Constitution and the Tri Hita Karana Concept. The contents of the material regulated in this regional regulation are guidelines for the P4GN facilitation process in Buleleng Regency, so that it is hoped that Buleleng will be clean from narcotics.

Keywords: *Facilitation, P4GN, Buleleng Regency*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”. Golongan narkotika ada 3 (tiga), yaitu:

1. Narkotika Golongan I; narkotika golongan ini dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy.
2. Narkotika Golongan II; Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III; Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Narkotika dapat mengakibatkan tingkat ketergantungan yang tinggi dan sangat berbahaya jika terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksudkan di atas disebut penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan merugikan orang lain terkategori melakukan kejahatan narkotika yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta diancam dengan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang terkategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), mengingat dampak dan korban dari kejahatan narkotika sangat besar. Kejahatan yang terkategori sebagai kejahatan *extra ordinary crime* adalah kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.

Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai salah satu kejahatan *extra ordinary crime* karena kejahatan narkotika ini sudah masuk

hampir ke semua lini kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan dan juga pelaku dan/atau korbannya tidak memandang usia mulai dari anak-anak, dewasa bahkan usia lanjut. Kejahatan narkoba ini telah memberikan dampak negatif yang sangat besar dan luas dalam kehidupan masyarakat. Berdampak pada kehidupan sosial, dimana pelaku atau korban tindak pidana narkoba mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya di masyarakat, mereka menjadi pendiam (keluar dari pergaulan sosial), sering membohongi orang-orang sekitarnya (terutama keluarga), tidak efektif atau malas dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari dan dampak sosial lainnya. Berdampak terhadap kehidupan budaya, umumnya korban tindak pidana narkoba tidak memiliki inovasi dan kreativitas sehingga berpengaruh negatif terhadap pengembangan budaya atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Berdampak terhadap ekonomi, pecandu atau korban tindak pidana narkoba umumnya menghabiskan uang atau kekayaannya hanya untuk membeli narkoba. Berdampak pada kehidupan politik, pelaku atau korban tindak pidana narkoba umumnya mengalami masalah dalam perkembangan mental akibat kecanduan narkoba, sehingga menyebabkan tidak menggunakan rasionalnya dalam melakukan pemilihan. Apalagi pecandu tersebut adalah tokoh politik atau pejabat pemerintahan maka berpengaruh negatif kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Kejahatan-kejahatan narkoba tidak saja dilakukan oleh perorangan tetapi dilakukan oleh kelompok orang melalui suatu jaringan (mafia) yang dimungkinkan tidak saja berada dalam satu negara tetapi juga antar negara, sehingga kejahatan narkoba tidak saja berskala nasional tetapi juga internasional. Alasan lain, kejahatan narkoba sebagai *extra ordinary crime* dikarenakan korbannya lebih banyak pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, dimana masa pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar kedepan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri sendiri sebagai generasi bangsa yang kuat dan mandiri (Gde Made Swardhana, 2016: 267).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dampak luas dari kejahatan narkoba menyasar kesemua lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir angkutan, anak jalanan, pekerja dan sebagainya (Fransiska Novita Eleanor, 2011: 440). Hal demikian, disebabkan karena terlalu mudahnya narkoba menyebar di dalam masyarakat dan sangat mudah didapatkan. Persebaran pecandu di Indonesia pada tahun 2018, terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan, yaitu: lingkungan kerja 59,3 % (\pm 2 juta pecandu), lingkungan pendidikan 23,7 % (\pm 800 ribu pecandu) dan lingkungan masyarakat 17 % (\pm 573 ribu pecandu) (Pedoman Penggiat P4GN, 2019: 1)

Diagram 1

Sedangkan dampak besar yang dimaksudkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan:

1. Gangguan kesehatan masyarakat, bahkan kematian; hasil survey yang dilakukan oleh BNN dan Puslitkes UI tahun 2018 di 34 Propinsi di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,1 % atau diestimasikan sejumlah 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun melakukan penyalahgunaan narkotika dengan angka kematian 30 orang per hari (Pedoman Penggiat P4GN, 2019: 1)
2. Terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain dan memicu kenakalan remaja di masyarakat;
3. Menurunnya tingkat ekonomi keluarga, bahkan tidak sedikit kasus yang menyebabkan kemiskinan;
4. Menurunnya kualitas pendidikan pada generasi muda;
5. Terjadinya permasalahan sosial yang sulit diatasi di masyarakat, seperti: tawuran, seks bebas, pernikahan dini, *broken home*, dan lain-lain.

Di Kabupaten Buleleng kasus penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Angka penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika dapat digambarkan dari jumlah pelaku penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum. Data penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkotika di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sejumlah 130 orang
2. Jumlah kasus yang ditangani Satresnarkoba Polres Buleleng dari tahun 2020 s/d tahun 2022 adalah 123 kasus dengan jumlah pelaku 156 orang. Dari jumlah itu, yang diproses hukum sejumlah

153 orang dan yang dihentikan penyidikannya (SP3) sejumlah 3 orang.

3. Jumlah kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng dari tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah 6 kasus, dengan jumlah pelaku 7 orang. Sedangkan yang menjalani rehabilitasi dari tahun 2018 s/d 2022 sejumlah 282 orang.

Angka tersebut adalah orang yang terdata melakukan penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkoba, angka orang yang belum terdata dimungkinkan jumlahnya lebih besar dari itu. Untuk penelusuran kemungkinan jumlah kejahatan narkoba dapat digunakan Teori Gunung Es (*Iceberg Theory*) yang diciptakan oleh Roger Shuy. Teori Gunung Es merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencari penyebab sebuah permasalahan, yang menggambarkan bahwa gunung es biasanya yang tampak hanya bagian di atasnya saja, sementara dibawahnya yang tidak tampak justru semakin besar. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Teori Gunung es



Pada gambar tersebut yang tampak hanya sebagian kecil saja sedangkan yang tidak tampak yang berada dibawah permukaan laut jauh lebih besar daripada yang tampak di atas permukaan laut. Teori ini sangat tepat digunakan untuk menggambarkan jumlah kasus penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkoba. Artinya data yang ada hasil dari penegakan hukum yang merupakan jumlah angka yang terdata yang sebagian kecil dari jumlah penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkoba yang ada dimasyarakat, jumlah yang belum terdata dimungkinkan jauh lebih besar daripada jumlah yang terdata. Itu artinya, kasus penyalahgunaan dan/atau kejahatan narkoba di Kabupaten Buleleng sudah ada pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Ketika suatu kejahatan terkategori sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara *extra ordinary* (cara-cara yang luar biasa). Cara-cara luar biasa yang dimaksud, bahwa kejahatan narkoba tidak saja menjadi tanggungjawab kepolisian dan BNN tetapi juga tanggungjawab semua pihak, utamanya pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, upaya luar biasa yang sudah dilakukan

pemerintah diantaranya: (1). Membentuk lembaga tersendiri yang ditugasi khusus dalam penanganan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional dari pusat sampai ke tingkat daerah, (2). membuat regulasi tersendiri terkait narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009 beserta regulasi turunannya, dan (3) Pemberlakuan khusus terhadap pelaku-pelaku kejahatan narkoba.

Di samping peran pemerintah pusat, maka juga dibutuhkan peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, karena itu dibuatlah program pemberdayaan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba) yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (yang selanjutnya ditulis Permendagri No. 12 Tahun 2019) menyatakan “Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah kabupaten/kota”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri No. 12 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

METODE

Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik pada prinsipnya adalah penelitian hukum dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk melahirkan norma hukum. Karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN adalah Penelitian Hukum Empiris.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris atau sering dikenal metode yuridis empiris. Hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan Naskah akademik ini diperlukan data-data empiris terkait dengan dampak bahaya narkoba di Kabupaten Buleleng dan kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat untuk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi P4GN.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menyebarkan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Amiruddin dan H. Zainal, 2020: 26). Hal mana dalam penelitian ini menggambarkan tentang urgensi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan semua

komponen masyarakat untuk melakukan Fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) tempat, diantaranya: BNNK Buleleng, Resnarkoba Polres Buleleng, dan LP Kelas IIB Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Peneliti memahami kondisi riil yang ada di Kabupaten Buleleng terkait dengan kejahatan narkoba.
- b. BNNK Buleleng dan Resnarkoba Polres Buleleng merupakan penegak hukum yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana terkait dengan kejahatan narkoba.
- c. LP Kelas IIB Singaraja sebagai tempat pembinaan narapidana yang di dalamnya juga terdapat narapidana kasus narkoba.

4. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari: Penelitian Kepustakaan berupa Data Sekunder dan Penelitian Lapangan berupa Data Primer. Data sekunder yang dimaksud berupa: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Sedangkan Data Primer dalam penelitian ini berupa: data empiris dan hasil wawancara dari informan yang diperoleh dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu:

a. Teknik Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan “serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”. Dalam penelitian dengan Jenis Penelitian Hukum Empiris, teknik studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain, seperti wawancara, pengamatan dan kuesioner (Bambang Waluyo, 2002: 50).

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dengan cara membaca dan memilih buku/literatur yang terkait dengan penelitian. Setelah dipilih, buku tersebut kemudian dipinjam dan dipelajari serta dicari pendapat-pendapat para pakar kemudian digunakan untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kegiatan mencari dan menemukan buku ini dilakukan dengan menggunakan metode bola salju, dimana bola itu akan menggelinding sampai pada suatu titik yang dianggap seimbang. Begitu pula dalam mencari dan menemukan buku yang terkait dengan penelitian ini, akan dimulai dari satu buku,

kemudian dari buku tersebut melalui daftar pustakanya akan ditemukan lagi judul buku yang lain dan kemudian dicari dan ditemukan dan begitu seterusnya sampai peneliti menganggap cukup dan sudah memenuhi untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam menganalisa dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*” (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004: 57-58). Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terpimpin artinya pada saat wawancara, pewawancara menggunakan pedoman tertulis yang berisi garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan

Saat ini produk hukum yang digunakan sebagai landasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 400/260/HK/2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng. Tim terpadu tersebut telah melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan instansi terkait, terutama BNNK Buleleng.

2. Kondisi yang ada

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNNK Buleleng (AKBP I Gede Astawa) penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dilihat dari data tentang Rehab menunjukkan sampai dengan tahun 2022 yang ditangani oleh BNNK Buleleng sebanyak 282 orang. Dari sisi pemberdayaan masyarakat belum semua desa memiliki komitmen dalam melakukan P4GN terbukti dengan regulasi yang ada di tingkat desa atau desa adat masih lemah, baik berupa peraturan desa (perdes) atau *Awig-awig* dan/atau *Pararem*. Dari 148 Desa/Kelurahan yang ada, baru 66 desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa dan dari 169 Desa Adat yang ada di Kabupaten Buleleng baru 91 desa adat yang memiliki *awig-awig* dan/atau *Pararem*. Dari 148 Desa/kelurahan yang ada, baru 4 desa menjadi Program Desa Bersinar dari BNNK, yaitu: Desa Sangsit, Desa Tukadmungga, Desa Kaliasem dan Desa Bubunan dan baru 3 desa masuk program Kawasan Bersih Narkoba dari Polres Buleleng yaitu Desa Kerobokan, Desa Sangsit dan Desa Sudaji. Sedangkan kondisi yang terjadi di LAPAS Kelas IIB Singaraja narapidana dan tahanan kasus narkoba pada tahun 2022 mencapai 130 orang dari 276 jumlah narapidana dan tahanan yang ada di LAPAS Kelas IIB Singaraja, jika diprosentasekan mencapai 47,2 %. Di sisi lain, LAPAS Kelas IIB Singaraja mengalami *over capacity*, kapasitas yang seharusnya adalah 100 orang tetapi di tahun 2022 diisi 276 orang narapidana dan tahanan sehingga terjadi kelebihan 176 orang. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap mekanisme pembinaan, terutama terhadap narapidana kasus narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LAPAS Kelas IIB Singaraja pada tanggal 28 September 2022, idealnya narapidana kasus narkoba ditempatkan pada LAPAS khusus, tidak menjadi satu dengan kasus-kasus yang lain tetapi karena minimnya LAPAS Khusus kasus Narkoba maka masih ditempatkan pada LP yang sama. Jika ditempatkan pada LAPAS yang sama apalagi LAPAS tersebut mengalami *over capacity* seperti LAPAS Kelas IIB Singaraja maka interaksi antara Narapidana Kasus Narkoba dengan yang bukan kasus Narkoba tidak dapat terhindarkan. Karena itu, apakah interaksi tersebut akan berdampak buruk atau baik sangat tergantung dari masing-masing individunya, tetapi menurut KALAPAS tidak semua berdampak buruk.

3. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah:

1. Budaya minum minuman keras dan merokok di Kabupaten Buleleng masih sangat kuat.

2. Keengganan untuk melaporkan kasus narkoba karena berbagai alasan, diantaranya:
 - a. Takut jika melaporkan akan diproses hukum
 - b. Bagi keluarga penyalahguna atau pecandu merasa bahwa itu adalah aib keluarga
 - c. Bagi orang lain merasa bahwa itu bukan urusannya, rasa kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan masih rendah.
3. Masyarakat tidak memiliki biaya untuk melakukan rehabilitasi medis jika tidak ada tanggungan dari pemerintah, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang sudah menjadi pecandu narkoba umumnya sudah tidak stabil atau sudah tidak memiliki kemampuan secara ekonomi (uangnya sudah habis untuk beli narkoba).
4. Fungsi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) milik pemerintah daerah yaitu puskesmas belum berfungsi, yang selama ini melakukan pelayanan hanya Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan pada masing-masing puskesmas belum dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai persyaratan IPWL. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Dalam hal pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan Desa Bersinar, desa masih kebingungan dalam pengalokasian anggaran dan lemahnya regulasi tentang P4GN di tingkat desa.
6. Tempat tahanan kasus narkoba masih dijadikan satu dengan tahanan yang lain, sehingga terjadi interaksi antara tahanan narkoba dan tahanan lain yang menyebabkan tahanan lain akhirnya ada yang terjerumus dalam kejahatan narkoba, seperti: dijadikan kurir pada saat mereka sudah lepas dari tahanan.
7. Belum ada pengawasan khusus terhadap narapidana yang sudah selesai menjalani pidana dan sudah dikembalikan ke masyarakat, sehingga potensi untuk mengulangi kejahatan narkotikanya masih tinggi.

Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pengaturan tentang Fasilitasi P4GN dalam bentuk peraturan daerah tentu menyimpulkan implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, dimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan semakin

kuat, masif, terstruktur dan sistematis. Ada beberapa implikasi yang dimungkinkan akan terjadi, diantaranya:

1. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah akan semakin kuat dalam mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Buleleng;
2. Instansi-instansi di bawah pemerintah daerah baik vertikal maupun non-vertikal memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuat regulasi pada masing-masing instansi;
3. Penggunaan anggaran yang berasal dari APBD dan sumber lainnya yang sah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
4. Dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang menjadi program BNN akan semakin maksimal.
5. Partisipasi kelompok masyarakat dalam upaya P4GN akan semakin kuat.
6. Perilaku masyarakat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba bisa diminimalkan karena adanya pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi P4GN, juga akan membawa implikasi pembebanan pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Kabupaten Buleleng oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Ada 3 (tiga) landasan filosofis yang digunakan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, sebagai berikut:

a. Pancasila

Dari kelima sila yang ada, jika dikaitkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang lebih dominan dijadikan sebagai rujukan adalah sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Percerminan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sangat dipentingkan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, karena roh dari upaya pencegahan bahaya narkoba ini adalah memberikan perlindungan kepada manusia, dalam hal ini menciptakan manusia yang sehat

secara fisik dan mental. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan sehat yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, serta negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut.

b. Pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan: “.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, ada beberapa pernyataan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna ketiga hal tersebut, dikaitkan dengan pengaturan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dimaknai bahwa tujuan dari Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.
2. Memajukan kesejahteraan umum; dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan membawa dampak yang sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan membawa dampak menjaga dan meningkatkan

kecerdasan generasi bangsa. Orang yang kecanduan narkoba memberikan dampak negatif pada perkembangan otaknya. Zat beracun dan berbahaya dari narkoba akan masuk ke otak melalui aliran darah, yang kemudian dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas impuls.

c. Konsep Tri Hita Karana

Tri Hita Karana terdiri atas tiga kata yaitu: tri yang artinya tiga, hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan dan karana artinya sebab. Dari asal kata tersebut, maka *Tri Hita Karana* diartikan tiga penyebab kebahagiaan manusia. Ketiga komponen tersebut, berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Tiga penyebab kebahagiaan tersebut, meliputi: hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Parhyangan*), hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). *Tri Hita Karana* merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Konsep ini dipakai sebagai landasan filosofis dalam merancang dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan harapan penerapan sistem ini mampu mewujudkan keseimbangan antara ketiga hubungan tersebut, terutama hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan Tuhan akan terjaga manakala manusia menjalani kehidupannya secara normal dan sehat. Seseorang yang kecanduan narkoba umumnya menjauhkan diri terhadap Tuhannya dan keyakinannya terhadap Tuhan akan semakin menurun. Sedangkan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*pawongan*), dapat dimaknai bahwa Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dilakukan untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dapat saling menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Landasan Sosiologis

Kabupaten Buleleng sangat membutuhkan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN, mengingat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Buleleng sudah menunjukkan pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini ditunjukkan oleh beberapa data dan

hasil wawancara yang dilakukan di beberapa instansi terkait, seperti: BNNK Buleleng, Satnarkoba Polres Buleleng dan LP Kelas IIB Singaraja.

Tabel 1
Kasus Kejahatan Narkotika di Satreskrim Polres Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1	2020	60	76	57 Kasus Selesai, 3 Kasus SP3, dikarenakan 1 tersangka gila, 1 tersangka hasil tes negatif dan 1 tersangka tidak cukup bukti
2	2021	44	55	kasus selesai
3	Sep-22	19	25	15 kasus selesai, 4 kasus dalam proses sidik
TOTAL		123	156	

Sumber: Sat Narkoba Polres Buleleng

Dalam data tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus selama tiga tahun terakhir, tetapi berdasarkan hasil wawancara kepada KBO Res Narkoba (IPTU Choiril Aman Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2022, penurunan tersebut disebabkan karena berbagai hal termasuk keengganan masyarakat dalam melaporkan kasus narkoba ke Polres Buleleng, dan juga adanya pandemi *covid-19* berpengaruh juga terhadap laporan kasus narkoba.

Tabel 2
Kasus Kejahatan Narkotika di BNNK Buleleng

No.	LKN	BERKAS / TSK	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P21	TAHUN
1	LKN 01	1 Berkas 1	1 KADEK YUDI ARMAWAN alias DEK WAN	P21	Agustus		2019
2	LKN 02	1 Berkas 1	1 Umar Chattab Bamattraf alias Umar	P21	Oktober		2019
3	LKN 01	1 Berkas 2	1 I WAYAN SURIWAN alias BALON	P21	Februari		2020
			2 KADEK YUDI ARMAWAN alias DEK WAN				
4	LKN 02	1 Berkas 1	1 I GUSTI BAGUS SUWIS MAYA alias GUS ANTON	P21	Agustus		2020
5	LKN 01	1 Berkas 1	1 GST NGR RAI	P 21	Januari	Pebruari	2021
6	LKN 01	1 Berkas 1	1 LUH ERAWATI	P 21	Agustus	Agustus	2022
Total		6 kasus	7 tersangka				

Sumber: Kasi Berantas BNNK Buleleng

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasi Berantas BNNK Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Nopember 2022, dinyatakan bahwa sedikitnya kasus yang ditangani melalui proses hukum dalam kejahatan narkoba ini, disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya: 1) BNNK lebih mengutamakan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi, 2) anggaran yang ada terkait penanganan kasus melalui proses hukum sangat terbatas, yaitu 1 kasus untuk satu tahun.

Tabel 3
Data Klien Rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng Tahun 2018
s/d 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH
1	Tejakula	11	Bondalem	3
			Tembok	1
			Les	2
			Sambirenteng	1
			Tejakula	4
2	Banjar	25	Cempaga	1
			Kaliasem	7
			Kayuputih	3
			Munduk	3
			Sidetapa	7
			Tirta Sari	1
			Tigawasa	1
			Tampekan	1
			Banjar Tegeha	1
3	Buleleng	90	Anturan	4
			Banyuasri	2
			Banjar Jawa	2
			Buleleng	1
			Baktiseraga	8
			Banjar Tegal	10
			Banyuasri	3
			Kaliuntu	5
			Liligundi	2
			Pemaron	1
			Petandakan	1
			Tukadmungga	4
			Kampung Kajian	6
			Kampung Baru	6
			Kampung Bugis	10
			Astina	10
			Penarukan	4
			Penarungan	1

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH
			Kampung Singaraja	1
			Penglatan	1
			Kendran	3
			Paket Agung	1
			Poh Bergong	1
			Banyuning	3
4	Busungbiu	8	Bengkel	2
			Tista	1
			Busungbiu	1
			Pelapuan	2
			Kedis	1
			Telaga	1
5	Gerokgak	3	Patas	1
			Sumberkima	1
			Pemuteran	1
6	Kubutambahan	14	Tamblang	4
			Tunjung	2
			Bontihing	1
			Pakisan	1
			Depeha	3
			Kubutambahan	3
7	Sawan	68	Bungkulan	4
			Sangsit	53
			Sudaji	6
			Lemukih	1
			Bebetin	1
			Giri Mas	3
8	Seririt	34	Banjar Asem	1
			Joanyar	2
			Kalianget	1
			Pangkung Paruk	4
			Patemon	5
			Pengastulan	3
			Unggahan	3
			Lokapaksa	5
			Seririt	2
			Gunung Sari	1
			Bubunan	7
9	Sukasada	17	Ambengan	1
			Pegadungan	1
			Sambangan	1
			Selat	1
			Panji	1
			Lumbanan	4
			Padangbulia	1

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH
			Pancasari	1
			Sukasada	4
			Bakung	2
10	Luar Buleleng	12		12
Total		282		282
NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN	JUMLAH
1	2018	12	Compulsary	16
2	2019	59	Voluntary	266
3	2020	40		
4	2021	139		
5	2022	32		
Total		282		282

Sumber: Kasi Rehab BNNK Buleleng

Berdasarkan data rehab sebagaimana tergambar, maka angka pecandu narkoba mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2021 sejumlah 139 orang, pada tahun 2022 sampai dengan penelitian ini dilakukan (bulan Nopember) berjumlah 32 orang. Dari 129 Desa dan 19 Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng, terdapat 80 Desa/Kelurahan ada kasus Narkoba atau sekitar 54 %.

3. Landasan Yuridis

Secara lebih spesifik keharusan untuk membentuk peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam Pasal 2 ayat (3) Permendagri tersebut, dinyatakan “Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah kabupaten/kota”. Dalam Pasal 2 ayat (4) Permendagri tersebut, dinyatakan “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, salah satunya berupa penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf a Permendagri No. 12 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, maka Permendagri No 12 Tahun 2019 secara tidak langsung telah

mendelegasikan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Fasilitas P4GN.

Pada sisi yang lain, terdapat Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Dalam dasar menimbang point a Perban No. 5 Tahun 2021 tersebut, dinyatakan “pemerintah daerah kabupaten/kota berperan penting dalam menggerakkan sumber daya pembangunann daerah untuk penguatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba guna mewujudkan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba”. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disingkat KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perban No. 5 Tahun 2021, dinyatakan “untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan KOTAN”. Dalam Pasal 6 ayat (1) Perban No. 5 Tahun 2021, dinyatakan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan KOTAN dilakukan penilaian oleh BNN”. Dipertegas lagi dalam Pasal 8 Perban No. 5 Tahun 2021 bahwa “ BNN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan indeks KOTAN”.

Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan atau ruang lingkup materi Fasilitas P4GN, termasuk pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, meliputi:

1. pelaksanaan fasilitas P4GN
2. antisipasi dini;
3. pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
4. kerjasama;
5. pembinaan dan pengawasan;
6. partisipasi masyarakat;
7. pendanaan;
8. penghargaan;
9. pelaporan; dan
10. sanksi.

Sedangkan arah pengaturan atau tujuan pengaturan Fasilitas P4GN dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program nasional P4GN;
2. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan P4GN.

2. Ruang Lingkup Muatan

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat digambarkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Muatan Materi Perda Fasilitasi P4GN

BAB I	Ketentuan Umum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini.
BAB II	Pelaksanaan Fasilitasi P4GN oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
BAB III	Antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika
BAB IV	Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi dalam kerangka Pelaksanaan Fasilitasi P4GN
BAB V	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat
BAB VI	Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi program kegiatan dalam rangka fasilitasi P4GN.
BAB VII	Partisipasi masyarakat dalam upaya P4GN di daerah
BAB VIII	Sumber pendanaan dalam Fasilitasi P4GN yang dapat berasal dari: APBD, APDDes dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan

	perundang-undangan
BAB IX	Penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan penegak hukum yang telah berjasa dalam membantu upaya P4GN
BAB X	Pelaporan dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi P4GN
BAB XI	Sanksi administrasi yang diberikan kepada pegawai, tim monitoring, pelaku usaha, tim terpadu dan IPWL yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka Fasilitasi P4GN
BAB XII	Ketentuan Penutup

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan kasus narkoba di Kabupaten Buleleng berada pada kondisi yang memprihatinkan berdasarkan jumlah data kasus dan korban narkoba, sehingga memerlukan peran pemerintah daerah yang semakin besar.
2. Peran pemerintah daerah semakin optimal dilakukan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
3. Kajian empiris terhadap karakteristik narkoba, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba menunjukkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis, sehingga diperlukan strategi dan sinergitas semua komponen dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Buleleng.
4. Hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemerintah daerah kabupaten untuk membuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN, yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika
- Bernard L. Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gde Made Swardhana. 2016. *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Pertama Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Philipus M. hadjon. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Miriam Budiardo. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Indroharto. 2003. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan
- Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. *Jurnal Hukum*. Vol. XXV. No 1. April 2011. Universitas Mpu Tantular Jakarta.
- Rospita Adelina Siregar. 2019. “Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya”. *Jurnal Comunita Servizio*. Vol. 1 Nomor 2. Universitas Kristen Indonesia.
- BNN. 2019. *Pedoman Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional.
- BNN. 2020. *Indeks P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*. Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BULELENG

**I Nyoman Tika¹, Putu Indah Rahmawati², I Made
Pageh³, Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana⁴
I Putu Adhy Wicaksana Adi Saputra⁵
I Gede Suardika⁶**

**Universitas Pendidikan Ganesha¹²³
Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng⁴⁵⁶**

E-mail: nyoman.tika@undiksha.ac.id¹, indah.rahma@undiksha.ac.id²,
made.pageh@undiksha.ac.id³, triyuliamira@gmail.com⁴,
wicakjdm@gmail.com⁵, ardi_7199@yahoo.com⁶

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi kebijakan dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Buleleng. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian mixed method. Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) SIDa Kabupaten Buleleng masih belum optimal; (2) merevisi roadmap SIDa 2017 dengan rencana aksi yang lebih relevan; (3) Strategi kelembagaan SIDa yang sekarang sudah bagus. Dalam penataan jaringan, perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, LSM di nasional dan internasional untuk bisa menindaklanjuti hasil SIDa dengan lebih operasional dan memberi dampak yang luas baik secara ekonomi maupun sosial; (4) Dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah Buleleng harus berbasis data dan teknologi informasi secara kelembagaan dikelola dengan satu sistem aplikasi. Rekomendasi sebagai tindak lanjut, yaitu: (1) Balitbang Inovda membantu mengidentifikasi inovasi apa saja yang bisa dikembangkan untuk bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan memberikan PAD bagi Kabupaten Buleleng; (2) Inovasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) sangat penting untuk meningkatkan nilai IKM; (3) Kabupaten Buleleng perlu membuat desa percontohan yang bisa memotivasi desa-desa lain untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Buleleng; (4) Buleleng menyediakan dana pendamping dan

bekerjasama dengan perguruan tinggi di Bali untuk bisa mengakses pendanaan yang ada di level nasional dan internasional.

Kata Kunci : *SIDa, Buleleng, inovasi, penguatan, strategi*

Abstract

The purpose of this research to formulate a policy strategy in strengthening the regional innovation system of Buleleng Regency. This research method used a mixed method research approach. Data were collected by questionnaires, interviews, observations and documentation. The results showed that (1) the SIDa of Buleleng Regency is still not optimal; (2) revise the 2017 SIDa roadmap with a more relevant action plan; (3) SIDa's current institutional strategy is good. In structuring the network, it is necessary to establish cooperation with university, local governments, communities, NGOs at national and international levels to be able to follow up on the results of SIDa more operationally and have a broad impact both economically and socially; (4) In strengthening the Buleleng regional innovation system, it must be based on data and information technology institutionally managed with one application system. Recommendations as a follow-up, namely: (1) Balitbanginovda helps identify what innovations can be developed to be able to provide a wider economic impact and provide income for Buleleng Regency; (2) Innovations implemented by regional device are very important to increase community satisfaction index; (3) Buleleng Regency needs to create a pilot village that can motivate other villages to improve the welfare of the Buleleng community; (4) Buleleng provides matching funds and collaborates with universities in Bali to be able to access project funding at the national and international levels.

Keywords: *SIDa, Buleleng, innovation, strengthening, strategy*

PENDAHULUAN

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Fokus dari implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Bali, meliputi: a) kebijakan SIDa; b) penataan unsur SIDa; dan c) pengembangan SIDa. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat SIDa Provinsi Bali adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubenur Bali, dan untuk Kabupaten buleleng sesuai dengan visi misi Bupati Buleleng.

Kabupaten Buleleng memiliki berbagai potensi mulai dari sumber daya fisik yang meliputi sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan serta industri, sumber daya kelembagaan serta sumber daya manusia yang handal, namun inovasi (mulai dari ide kreatif inovatif, pengembangan inovasi serta

arah kebijakannya) selama ini belum tertata/terencana dengan baik. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, untuk meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi membuat perencanaan agar terbentuk sesuai misi dan visi pemerintah kabupaten Buleleng.

Di dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/503/HK/2020 tentang Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng disebutkan bahwa dari total 47 Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Buleleng, baru 17 PD yang ditetapkan inovasinya; serta dari 148 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng baru 18 Masyarakat/Kelompok masyarakat yang ditetapkan inovasinya. Dengan demikian, gerakan Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng yaitu "*One PD One Innovation and One Village One Innovation*" belum terlaksana secara optimal. Dimana keterkaitan selanjutnya adalah belum optimalnya dalam hal pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (dalam rangka memperoleh penghargaan *Innovative Government Award*) serta perolehan Dana Insentif Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, dimana ditetapkan bahwa Kabupaten Buleleng menempati peringkat ke 158 dari 415 Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia dengan kategori Kabupaten Inovatif, menurun dari tahun sebelumnya Kabupaten Buleleng menempati peringkat ke 110 dari 415 Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia dengan kategori Kabupaten Sangat Inovatif.

Belum tersedianya dasar dalam peningkatan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik terkait pelaksanaan/pengembangan inovasi daerah dalam upaya peningkatan daya saing daerah; Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah; Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada yang mempunyai nilai tambah dalam membangun perekonomian daerah; Belum optimalnya perlindungan terhadap karya-karya yang bersifat inovatif; Belum adanya suatu sistem perencanaan inovasi daerah (biasa disebut Roadmap Penguatan SIDA) untuk menunjang peningkatan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (Kompetisi IGA) dalam rangka perolehan Dana Insentif Daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Didalam optimalisasi pelayanan publik tersebut, maka berbagai ide dan gagasan inovatif daerah sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik tersebut. Menurut Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, pada Pasal 1 ayat 2 berbunyi Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA bahwa: "keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah".

Berpijak dari permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menyusun Kajian Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Buleleng sebagai sistem yang mengatur dan mengarahkan untuk terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam mendorong terciptanya tumbuh kembang inovasi serta teknologi baru yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi proses suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Kajian Penguatan SIDA, kabupaten Buleleng adalah untuk 1) mengidentifikasi kondisi sistem inovasi, 2) merumuskan strategi kebijakan dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah, 3) merumuskan strategi penataan kelembagaan, jaringan dan sumberdaya dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah, 4) merumuskan strategi pengembangan yang dilakukan dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Harapannya adalah potensi-potensi lokal di Kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi untuk selanjutnya, dengan memperhatikan arah pembangunan yang telah direncanakan pada level pemerintahan yang lebih atas, potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan secara inovatif untuk memperoleh outcome yang optimal.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian mixed method yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Lokasi dan Waktu Penelitian, Penelitian ini melibatkan seluruh PD, perangkat desa dan pemerintah daerah di tingkat kecamatan di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 kecamatan, 148 desa dan 27 PD. Kegiatan penelitian dilakukan secara sentral di Kota Singaraja sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2022.

Teknik mengumpulkan data: (1) Online survey menggunakan google form Survey (2) Studi dokumentasi berkaitan dengan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Buleleng, RPJP Kabupaten Buleleng, Data Inovasi Kabupaten Buleleng, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, (3)

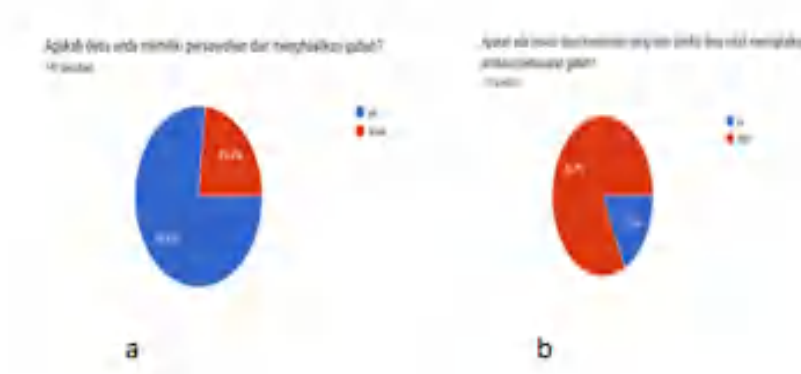
Wawancara, Wawancara dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk menggali informasi lebih mendalam dengan waktu yang lebih leluasa dibandingkan dengan FGD. Wawancara dilakukan secara terstruktur di lokasi kerja responden, (4) Focus Group Discussion (FGD) FGD digunakan dalam penelitian ini.

Sumber data primer/responden: (1) Kepala Desa/ Aparat Desa di Kabupaten Buleleng, (2) Camat di Kabupaten Buleleng, (3) PD di Kabupaten Buleleng, (4) Tokoh Masyarakat (5) Akademisi, (6) Perumda di Kabupaten Buleleng. Teknik Analisis dengan melalui dua phase dengan pendekatan mixed method. Phase pertama, data yang terkumpul dengan menggunakan online survey akan dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Kemudian, data yang terkumpul dari wawancara dan FGD akan di dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sistem Inovasi Di Kabupaten Buleleng Saat Ini

Untuk mendapatkan kondisi sistem inovasi di Kabupaten Buleleng, peneliti menyebarkan survey online untuk mendapatkan informasi terkait inovasi yang telah diimplementasikan di Kabupaten Buleleng. Survey diberikan kepada 148 desa dan 28 OPD di Kabupaten Buleleng. Dari survey kepada pemerintah desa, ada sebanyak 141 survey yang diisi dengan baik dan dapat disimpulkan bahwa respond ratelynya mencapai 95%. Pertanyaan pertama terkait pertanian terutama terkait pertanian yang menghasilkan padi sebagai kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Bagan 1 menunjukkan bahwa 76,6% desa di Kabupaten Buleleng memiliki pertanian yang menghasilkan padi/gabah. Terdapat 23% desa yang tidak menghasilkan padi.



Bagan 1. Luas persawahan dan system inovasi pertanian
(a) Kepemilikan persawahan yang menghasilkan gabah. (b) Inovasi Terkait Sektor Pertanian.

Pertanyaan lanjutan terkait sektor pertanian, Apakah ada inovasi desa/kecamatan yang telah dimiliki desa untuk meningkatkan produksi/pemasaran gabah? Gambar 1.b dapat dilihat bahwa 82,3% pemerintah desa menyatakan belum ada inovasi terkait peningkatan kapasitas produksi pertanian maupun pemasarannya, sedangkan 17,7% menyatakan telah melakukan inovasi terkait sektor pertanian. Dalam hal pertanian, pertanyaan terbuka diberikan kepada responden dan terdapat beberapa inovasi yang diharapkan oleh responden, seperti yang dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kode Responden dan Inovasi yang Diharapkan

Kode Responden	Inovasi yang diharapkan
R1, R14, R54, R55, R57, R140	Inovasi perbaikan irigasi
R11, R13, R19, R20, R22, R27, R128	Peralatan modern untuk pengolahan sawah
R47, R48, R50, R52, R79, R84, R92, R96, R21	Peralatan modern untuk panen
R10, R13, R20, R118, R122	Adanya sistem yang terintegrasi dari petani hingga penjualan hasil panen
R8, R18, R28, R31, R33, R66, R88, R91	Inovasi standarisasi harga gabah dan pemasaran gabah
R44, R77, R144	Pembelian hasil pertanian melalui BUMDES

Terdapat beberapa *qoute* penting terkait irigasi yaitu “kami mengharapkan agar kedepannya Pemerintah bisa membantu dalam penanganan irigasi terutama di musim kemarau” (R14) dan “Adanya inovasi terkait dengan pengairan di sawah tadah hujan”. Berangkat beberapa masukan dari responden tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan air menjadi sangat penting bagi petani dalam meningkatkan kapasitas produksi padi/gabah. Berkurangnya debit air di musim kering dan rusaknya beberapa bagian saluran irigasi menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kapasitas produksi pertanian.

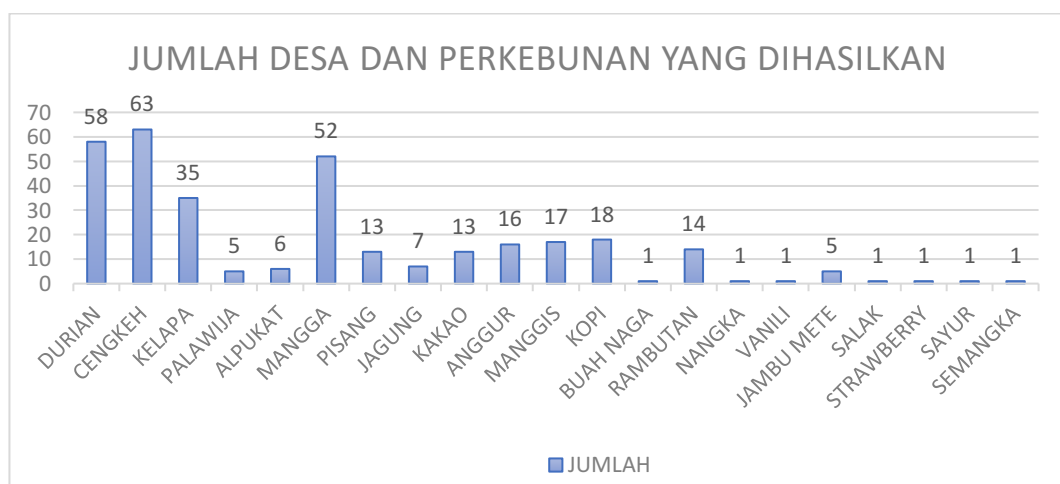
Peneliti sempat melakukan wawancara mendalam kepada beberapa petani padi di Desa Lokapaksa. Pernyataan yang sama ditemui pada saat wawancara, bahwa petani memerlukan inovasi untuk mengolah tanah dengan lebih produktif (misalnya dengan menyediakan traktor dengan sistem sewa) kemudian pada saat musim panen, petani memerlukan mesin untuk panen gabah yang otomatis

dengan mesin penyosoh padi. Untuk pengeringan padi, diperlukan lahan yang luas. Oven untuk pengering padi akan sangat membantu untuk mempercepat proses dan menjaga kestabilan kualitas gabah yang dihasilkan. Dengan adanya bantuan mesin-mesin pertanian tersebut, petani akan sangat terbantu dan bisa menghasilkan beras dengan lebih produktif dengan ongkos produksi lebih murah (I₁). Hasil wawancara tersebut sekaligus merupakan triangulasi data dari hasil survey online yang dipaparkan diatas.

Selanjutnya, wawancara dengan Direktur Perumda PD Swatantra menyampaikan bahwa:

“Buleleng memiliki peluang bisnis yang bagus untuk bisa membantu mendongkrak pertanian dan perkebunan yaitu dengan melakukan inovasi mendirikan pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan dipadukan dengan ekowisata. Lokasi yang paling memungkinkan dan sudah dimiliki Kabupaten Buleleng terletak di wilayah Barat yaitu di Kecamatan Gerokgak. Dengan menambahkan peralatan modern di bidang pertanian dan perkebunan, maka Buleleng bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, memang masterplan perlu dipersiapkan dan kajian teknis terkait pembiayaan dan feasibility study nya (I₂)”

Dalam bidang perkebunan, hasil survey menyatakan bahwa Kabupaten Buleleng secara mayoritas menghasilkan durian, cengkeh, mangga dan kelapa. Perkebunan di Kabupaten Buleleng juga menghasilkan buah lainnya seperti pisang, alpukat, anggur, kopi, manggis, semangka, strawberry. Jumlah desa yang menghasilkan buah dari perkebunan dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2. Jumlah Desa dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Buleleng

Di bidang perkebunan, hasil survey menyatakan bahwa 74,5% desa belum memiliki inovasi yang dapat meningkatkan produksi atau pemasaran hasil perkebunan di daerah mereka. Pada Bagan 4 dapat

dilihat bahwa hanya 25,5% menyatakan sudah memiliki inovasi dibidang perkebunan.



Bagan 3. Inovasi Desa Untuk Meningkatkan Hasil Perkebunan

Dari *open ended questions* yang disampaikan di survey, dapat dilihat beberapa inovasi yang telah dilaksanakan beberapa desa, yaitu: (1) Inovasi teknik sambung batang pohon alpukat (2) Inovasi bibit untuk pohon durian Ki Raja non Biji, (3) Inovasi *banana smart village* dan pengolahan sorgum, (4) Inovasi pembuatan wine bekerjasama dengan Hatten Wine, (5) Inovasi brem buah manggis, (6) Inovasi pengolahan batok kelapa (7) Inovasi kopi olah basah dan kopi madu. Sedangkan dari 75% desa yang belum memiliki inovasi, mengharapkan inovasi dibidang perkebunan seperti yang disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Inovasi Dibidang Perkebunan

Kode Responden	Inovasi yang diharapkan
R2	Pengolahan mangga
R34, R37, R52, R56, R60, R61, R78, R86, R100, R115, R126, R135	Pemasaran Produk Perkebunan Pasca Panen
R5	Pengolahan Jagung menjadi Tepung Jagung
R5	Pengolahan Singkong menjadi Mocaf
R10, R34, R135	Memperkuat Bumdesa sebagai usaha penampung produksi masyarakat desa dan di link kan dengan perusahaan2 milik daerah sebagai market leader
R20	Bintek peningkatan kualitas hasil panen, pada saat paska panen, seperti contoh

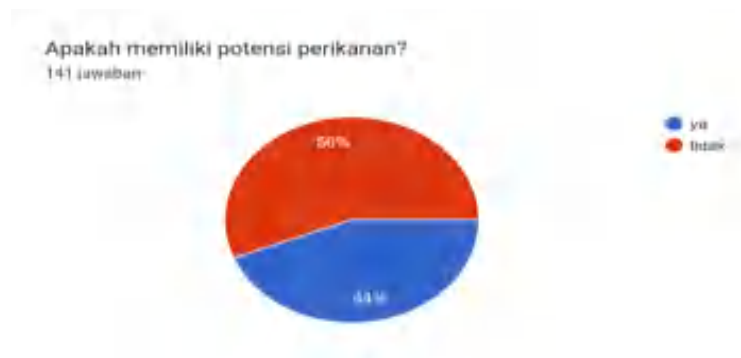
	pengolahan buah naga menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomis yang lebih tinggi.
R65	Adanya pembinaan inovasi desa

Dalam hal pemasaran, seorang responden menyampaikan inspirasi, “kami mengharapkan agar pemerintah ikut memasarkan produk kami agar bisa mendapatkan harga yang maksimal bila mana perlu kita adakan ekspore ke luar negeri yang di dukung oleh pemerintah” (R14).

Hasil wawancara dengan Perbekel Desa Sidatapa, terkait perkebunan durian disampaikan bahwa:

“Buleleng memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan durian organik yang unggul karena luas lahan dan ketinggian yang cocok untuk perkebunan durian. Namun, kami dari petani memerlukan bantuan pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan hama yang banyak terjadi pada tahun 2-3 pohon durian dan mengakibatkan gagal panen. Durian Buleleng sudah dikenal dan diterima pasar di level nasional, namun kuantitasnya masih belum bisa terpenuhi dan kalau bisa dikembangkan dengan durian organik maka harganya bisa menjadi lebih mahal (I₃)”

Selanjutnya, di bidang perikanan terdapat 44% dari 141 desa memiliki potensi perikanan dan sebanyak 56% menyatakan tidak memiliki potensi perikanan.



Bagan 4. Potensi Perikanan di kabupaten Buleleng

Hasil survey menunjukkan bahwa 87% desa menyatakan belum memiliki inovasi. Hanya 12% desa memiliki inovasi di bidang perikanan. Hal ini dapat dilihat pada Bagan 5.

Apakah ada inovasi desa/kecamatan yang telah dimiliki desa untuk meningkatkan produksi/pemasaran hasil laut?
141 jawaban



Bagan 5. Inovasi dalam Bidang Perikanan di kabupaten Buleleng

Inovasi dibidang perikanan yang telah ada di bidang perikanan adalah: (1) Minapadi dari Desa Panji, (2) Konservasi Terumbu Karang dari Desa Tejakula, (3) Konservasi Pantai dari Desa Sangsit

Inovasi yang diharapkan masyarakat di bidang perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Inovasi yang diharapkan di Bidang Perikanan

Kode Responden	Inovasi yang diharapkan
R10, R22, R49, R61, R66, R75, R76, R82, R108, R112, R116, R117, R121, R124.	Bimtek dan pendampingan yg aktif kpd pembudidaya ikan air tawar
R19	Bimtek pemasaran ekspor budidaya bandeng
R5, R6, R23, R38, R39, R45, R118, R119	Inovasi cara pengawetan dan pengemasan hasil laut
R10	Inovasi tempat pelelangan ikan modern
R100	Inovasi cool storage untuk penyimpanan hasil laut.

Di bidang Pariwisata, 51% dari 141 Desa di Kabupaten Buleleng menyatakan telah melakukan inovasi untuk meningkatkan potensi pariwisata. Sedangkan 49% menyatakan belum melakukan inovasi

bidang pariwisata. Potensi pariwisata yang disampaikan dalam survey terdiri dari: air terjun, wisata pesisir/pantai, hiking, trekking, wisata dolphin, wisata bersepeda.



Bagan 6. Inovasi dalam Bidang Pariwisata di Kabupaten Buleleng

Ada beberapa pendapat responden yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, antara lain:

"Selama ini Pemda masih di posisi hanya memberikan pelatihan-pelatihan dan pembuat kebijakan-kebijakan aturan, belum sampai menyentuh bantuan-bantuan infrastruktur dalam menunjang aktivitas wisatawan yg lebih luas & nyaman sehingga akan terciptanya "Sapta Pesona" (R.10). Desa memerlukan bantuan pemda untuk pengembangan dan penataan objek wisata yang ada di desa, akses jalan dan fasilitas wisata (R79). Dukungan Pemda untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar pariwisata dapat berjalan dengan baik di desa kami (R85). Promo di medsos, dukungan infrastruktur dan pinjaman lunak untuk penataan objek wisata kepada pokdarwis (R134)".

Dalam hal pelayanan publik, sebagian besar PD di Kabupaten Buleleng menyatakan sudah memiliki inovasi. Terdapat 26 PD yang telah memiliki inovasi. Data inovasi yang telah dihasilkan dari PD yang ada di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Inovasi yang telah dihasilkan PD di Kabupaten Buleleng

NO	Instansi	Ada Inovasi
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng	Pengusulan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk kelengkapan kelembagaan kelompok perikanan secara online
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	POSKO DO Upaya menyelamatkan generasi bangsa

	Kabupaten Buleleng	
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	Buleleng Emergency Services
4	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Puskesmas CGT
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng	Pusat Informasi Layanan Kepegawaian BPKSDM Kabupaten Buleleng (PILBKD)
6	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Sistem Informasi Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM (SIPPASKUM)
7	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	Aplikasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	Respon Time
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	Pendataan Linmas dan KTA. Karena masing-masing anggota Linmas belum memiliki Kartu Tanda Anggota dan mendata Linmas yang aktif di setiap desa.
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	PanG denbukit
11	Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	Aplikasi SISUPEL
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	Pembangunan Kawasan Perdesaan Eko Wisata Budaya "Bali Aga", karena kawasan tersebut sudah menjadi kawasan Prioritas Nasional dan telah mendapatkan beberapa bantuan.
13	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	Ambulatory yg kaitan penanganan vaksinasi secara mobile kelokasi vaksinasi

14	Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	Memaksimalkan pemanfaatan jaringan nirkabel sebagai media pendukung pemutakhiran database pariwisata dan sebagai pendukung promosi marketing dan branding Pariwisata Buleleng
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng	Singaduta (Sistem Pengarsipan Digital Urusan Pertanahan)
16	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng	Alarm Protokol Kesehatan Covid 19
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng	Pemanfaatan energi Surya untuk meningkatkan akses air minum masyarakat perdesaan
17	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Pengurangan sampah dengan metode Eco enzym, karena memberikan banyak manfaat bagi lingkungan
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Layanan Digital Perpustakaan
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng	PAS - Prima dalam pelayanan - Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan - S O P nya jelas
20	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	Inovasi tentang pemadam Kebakaran
21	Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng	SETDA SIGaP (Sekretariat Daerah Sharing Informasi Gagasan dan Pendapat)
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng	Home Visit (Kunjungan ke rumah) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
23	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng	SIAP YANADA

24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	Sidakep (siap Datang ke rumah penduduk) untuk melayani penerbitan dokumen kependudukan
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Dinas Kominfosanti sudah memiliki inovasi berupa aplikasi ekliping dengan domain https://eklipping.bulelengkab.go.id/
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng	- PASS (Pelayanan antar izin siap sedia)

Dari hasil survey diperoleh data bahwa terdapat 12 PD yang belum memiliki inovasi dan mengharapkan adanya inovasi yang baru di instansi yang mereka pimpin. Data PD yang belum memiliki inovasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Nama Instansi yang belum memiliki Inovasi

NO	Instansi	Inovasi apa yang diharapkan?
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng	Inovasi terkait pengembangan Web Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng
2	Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng	Adanya inovasi berupa sistem/aplikasi yang bisa mengintegrasikan data seluruh OPD dengan Bagian Ekbang sebagai koordinator dalam penginputan data laporan kinerja dan monev pelaporan Realisasi dan Anggaran Pemkab Buleleng.
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	Inovasi terkait tupoksi kesbangpol
4	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng	E-LPPD, Laporan LPPD melalui online
5	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	sistim informasi pelayanan terpadu
6	Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	Digitalisasi fasilitasi penyusunan produk hukum

7	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	E-MAP : elektronik manajemen aset penerangan jalan umum
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng	Inovasi terkait tupoksi Bagian Kesra
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Inovasi Percepatan Informasi
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	Digitalisasi fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
11	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Perpustakaan elektronik berbasis aplikasi
12	Inspektorat Kabupaten Buleleng	SIPI (Sistem Informasi Pemeriksaan Internal)

Strategi Kebijakan Dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Merujuk Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang telah disusun oleh tim ahli dan telah dirumuskan dalam dokumen kajian Roadmap SIDA (2017). Dari perbandingan hasil survey online yang dilaksanakan tim SIDA tahun 2022 dengan roadmap SIDA tahun 2017 maka dapat dilihat bahwa inovasi yang disusun oleh PD di Kabupaten Buleleng terdiri dari tiga jenis: (1) beberapa PD telah secara konsisten mengikuti roadmap yang disusun (contoh: BPKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan) (2) Ada beberapa PD yang mengembangkan inovasi berbeda dari roadmap SIDA (contoh : Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng) (3) Ada beberapa PD yang belum memiliki inovasi (lihat tabel 4 dan 5). Dengan membandingkan inovasi yang terjadi di tahun 2022 dengan roadmap yang disusun tahun 2017 maka dapat dilihat bahwa ketercapaian roadmap SIDA pada beberapa PD belum berjalan sesuai harapan.

Pada sektor pertanian, berdasarkan atas potensi pertanian di Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan arah kebijakan pertanian nasional, maka rencana aksi SIDA di sektor pertanian yang disusun tahun 2017 meliputi: (1) Penguatan inovasi sistem irigasi yang mampu menyediakan sistem irigasi secara berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian berkelanjutan. (2) Penguatan input produksi seperti pemanfaatan TTG di bidang pengolahan lahan. (3). Penguatan inovasi pemanfaatan TTG di sektor produksi dan sektor pasca panen. (4) Penguatan sistem inovasi pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata dan industri kecil serta perdagangan. (5) Penguatan sistem kelembagaan petani yang berorientasi pada penguatan subak dan organisasi lainnya. (6) Penguatan sistem pendukung perbankan yang memihak kepada pertanian.

Keenam rencana aksi tersebut sejalan dengan harapan dari masyarakat sesuai dengan hasil survey yang disebar oleh tim SIDA pada tahun 2022. Sehingga disarankan agar pada sektor pertanian, skala prioritas pengembangan inovasi diluruskan kembali agar sesuai dengan roadmap dan target capaian yang telah disusun serta sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Pada sektor pariwisata, rencana aksi inovasi sektor kepariwisataan Kabupaten Buleleng yang disusun pada tahun 2017, meliputi: (1) Pengembangan destinasi pariwisata alternatif yang sesuai dengan budaya Bali, (2) Inovasi sistem pemasaran pariwisata yang memanfaatkan semua sistem jaringan termasuk teknologi informasi, (3) Inovasi pengembangan industri pariwisata yang sinergis dengan pertanian dan industri kerajinan yang kreatif, (4) Inovasi dalam tata kelola kelembagaan yang partisipatif, berorientasi pada penguatan masyarakat pelaku pariwisata.

Inovasi tersebut dapat dilihat hasilnya dengan hadirnya channel youtube [Yuk Ke Buleleng - YouTube](#) serta dengan melaksanakan berbagai pelatihan tata kelola kelembagaan dibidang pariwisata. Namun dalam survey yang dikirim oleh tim SIDA 2022 sebenarnya masyarakat mengharapkan adanya bantuan pemerintah untuk pengembangan dan penataan objek wisata yang ada di desa, akses jalan dan fasilitas wisata yang ada di Desa Wisata.

Oleh karena itu, strategi kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Buleleng tahun 2022 sebaiknya mengakomodasi saran/masukan dari masyarakat. Promosi digital yang gencar tanpa dibarengi dengan pembenahan akses jalan dan fasilitas pariwisata di Desa Wisata atau di objek wisata tentu malah menjadi investasi biaya yang tidak produktif. Rencana aksi untuk sektor pariwisata disarankan sebagai berikut: (1) Mendukung inovasi pariwisata dan desa wisata dengan membantu perbaikan fasilitas wisata dan akses jalan, (2) Inovasi digital marketing pariwisata Buleleng dengan sistem aplikasi (3) Inovasi pengembangan industri pariwisata yang sinergis dengan pertanian dan industri kerajinan yang kreatif, (4) Inovasi sistem pinjaman lunak bagi pokdarwis yang ingin mengembangkan usaha pariwisata yang produktif bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat/desa, (5)

Inovasi dalam tata kelola kelembagaan yang partisipatif, berorientasi pada penguatan masyarakat pelaku pariwisata.

Pada sektor perkebunan, pada dokumen SIDA Kabupaten Buleleng tahun 2017 telah disebutkan bahwa Buleleng memiliki banyak produk unggulan yang penting untuk dikembangkan dan kemudian inovasi difokuskan pada pembuatan bibit unggul dan perkebunan organik. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa Dinas Pertanian telah membantu masyarakat dengan memberikan bantuan bibit unggul durian, kelapa dan pisang. Namun, hasil survey dan wawancara dengan tokoh masyarakat ternyata masyarakat juga memerlukan inovasi lanjutan untuk sektor perkebunan.

Oleh karena itu, rencana aksi yang disarankan untuk sektor perkebunan adalah: (1) Memperkuat Bumdesa sebagai usaha penampung produksi masyarakat desa dan dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan milik daerah sebagai *market leader* maupun perusahaan nasional dan internasional, (2) Memperkuat inovasi desa dengan pembinaan UMKM agar bisa maju ke level *scale up*, (3) Meningkatkan bimtek peningkatan kualitas hasil panen perkebunan, (4) Meningkatkan bimtek pengolahan hasil perkebunan paska panen menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis tinggi, (5) Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian terkait pemberantasan hama perkebunan untuk membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil perkebunan di Kabupaten Buleleng, (6) Bekerjasama dengan pemerintah di level nasional untuk bisa membantu produk perkebunan bisa masuk ke skala ekspor.

Beberapa contoh peluang ekonomi yang bisa di tangkap oleh Kabupaten Buleleng adalah (1) meningkatnya harga gandum yang akan meningkatkan harga tepung terigu dan secara otomatis akan meningkatkan harga mie instans dan produk olahan terigu lainnya. Kabupaten Buleleng menghasilkan sorgum dengan kualitas yang bagus dan berpotensi menggantikan penggunaan terigu dengan kadar karbohidrat yang lebih rendah dan aman untuk pengidap diabetes. Peningkatan kuantitas produksi sorgum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sorgum agar menjadi lebih sehat, (2) perkebunan kelor yang dikembangkan masyarakat juga memerlukan inovasi untuk bisa menembus pasar ekspor. Harga teh kelor, tepung kelor dan produk olahan kelor sangat tinggi karena dikenal sebagai “magical tree” di dunia barat. Kemampuan ekspor Indonesia terkait kelor baru mencapai 10% dari kebutuhan dunia. Oleh karena itu, peluang Kabupaten Buleleng untuk mensejahterakan masyarakat dengan ekspor kelor sangat tinggi. Demikian juga dengan produk kelapa, kopi, cengkeh dan hasil perkebunan lainnya.

Pada sektor perikanan, Kabupaten Buleleng memiliki wilayah pesisir terpanjang di Bali dengan wilayah laut yang sangat luas. Hal ini menjadikan Buleleng sangat berpotensi untuk unggul di bidang perikanan. Hasil survey yang dipaparkan pada bagan 4 dan 5 maka

dapat dilihat bahwa harapan dari masyarakat perlu ditindak lanjuti untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng. Berikut ini rencana aksi yang disarankan untuk sektor perikanan adalah: (1) Meningkatkan bimtek dan pendampingan untuk budidaya ikan air tawar, (2) Meningkatkan inovasi mengenai pengawetan dan pengemasan hasil laut, (3) Meningkatkan inovasi pelelangan ikan modern, (3) Meningkatkan skema pendanaan untuk nelayan memiliki lebih banyak cool storage untuk penyimpanan ikan (4) Meningkatkan skema pendanaan untuk konservasi terumbu karang dan lamun.

Dalam mengatasi permasalahan pendanaan Kabupaten Buleleng yang terbatas maka pemda perlu mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM nasional maupun internasional untuk meraih pendanaan dalam rangka konservasi terumbu karang, lamun serta kegiatan-kegiatan lain terkait perubahan iklim. Beberapa skema pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim dikompetisikan di level nasional dengan dana yang cukup besar. Kementerian Keuangan dengan skema perubahan iklim bahkan bisa mengeluarkan dana sampai dengan 20 Miliar untuk satu project daerah dan informasi ini dapat dilihat di website The National Designated Authority for Green Climate Fund ([NDA GCF - Pengajuan \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/nda-gcf)).

Strategi Penataan Kelembagaan, Jaringan dan Sumber Daya Dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. SIDa merupakan kerangka membangun sinergi antar pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan Iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Buleleng.

Oleh karena itu, guna mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera dan berdikari berbasis *innovation-driven development*, maka perlu menata aktivitas kelitbangan yang mengarah pada upaya penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan, penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan, dan penataan kesumberdayaan inovasi pembangunan daerah. Kebijakan penataan unsur SIDa Kabupaten Buleleng berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan dan dunia usaha.

Survey online dengan pertanyaan terbuka telah dikirimkan ke seluruh PD yang ada di Kabupaten Buleleng untuk membahas terkait strategi penataan kelembagaan SIDa. Seorang responden dari sebuah PD menyatakan bahwa “kelembagaan yang sekarang sudah bagus, dimana terkait penelitian dan inovasi ditangani oleh lembaga khusus

yang berdiri sendiri seperti Balitbang Inovda Daerah” (R48). Berikut ini adalah beberapa masukan yang dirangkum dalam Tabel 6;

Tabel 6. Strategi penataan kelembagaan dalam mendukung SIDA

Kode Responden	Masukan Responden
R9	Melaksanakan inventarisasi dan penguatan inovasi pada setiap SKPD
R11	Menyediakan anggaran yang memadai untuk menunjang penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Buleleng
R12, R13, R29	Mengadakan lomba inovasi tingkat kabupaten
R16	Strategi pengembangan kebijakan sebagai suatu kesatuan kerangka kebijakan inovasi
R58	Dengan strategi mengintegrasikan inovasi daerah yg ada dengan satu sistem aplikasi yg dikelola oleh PEMDA
R29	Lebih intensipkan lagi penguatan dan pemahaman tentang inovasi yg dapat di lakukan untuk opd yg secara langsung melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat
R30	Membuat link hasil kajian atau penelitian dr universitas/institut yg sesuai bidang
R44	Penguatan regulasi dan penentuan insentif untuk mendorong pengembangan SIDA pada sektor unggulan
R 50	Dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah Buleleng, terutama terkait dengan inovasi yang dikembangkan harus berbasis data kemudian dilanjutkan dengan teknologi

Selanjutnya, untuk strategi penataan jaringan sistem inovasi daerah Kabupaten Buleleng agenda penguatan SIDA Kabupaten Buleleng perlu senantiasa meningkatkan komunikasi intensif antar instansi pemda Buleleng dengan kecamatan dan desa agar terwujud sinergi dan koordinasi penguatan SIDA Kabupaten Buleleng. Perlu pemetaan dan pendekatan kepada jejaring pendukung supaya bisa bersama-sama dalam mensukseskan inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan di daerah Buleleng. Koneksi internet menjadi faktor pendukung yang sangat penting untuk melaksanakan sinergi antar stakeholder.

Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi

perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik, dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup kabupaten Buleleng.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah terdiri atas (a) inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk: (a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(b) inovasi pelayanan publik; Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi: proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Pelayanan Publik meliputi: (1) Pelayanan barang publik; (2) Pelayanan jasa publik; dan (3) Pelayanan administrasi. (4) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi kriteria: (a) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi; (b) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan (e) dapat direplikasi.

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi, dapat berbentuk (a) penemuan; (b) pengembangan; (c) duplikasi; (d) sintesis. Penemuan merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Berdasarkan hasil survey yang disampaikan oleh pimpinan OPD untuk strategi penataan sumberdaya dalam mendukung penguatan

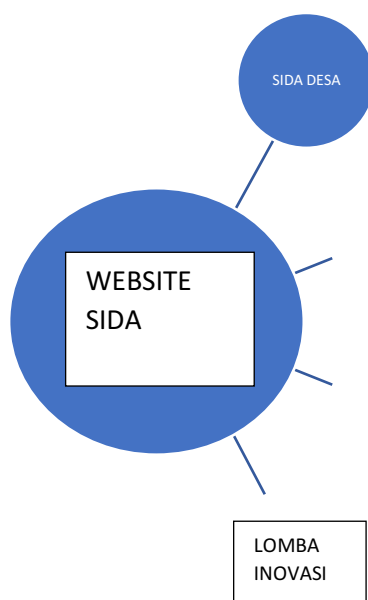
Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, ada beberapa masukan penting yang perlu diperhatikan (1) Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan sumber daya yang sesuai dengan inovasi yang akan dilaksanakan, pemenuhan sumberdaya yang mencukupi untuk mensukseskan kegiatan inovasi yang dilakukan (R51), (2) Sumberdaya dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah agar diberikan pelatihan sehingga mampu mengembangkan inovasi sejenis yang lebih menarik dan bermanfaat (R57), (3) Khusus SDM yang menangani inovasi di perangkat daerah perlu ditingkatkan jumlahnya termasuk upahnya/insentifnya, demikian juga untuk tenaga programmer kominfosanti perlu ditambah termasuk bisa dinaikkan upahnya. SDM di perangkat daerah perlu ditingkatkan kapasitasnya berupa bimbingan teknis atau sosialisasi terkait penciptaan inovasi-inovasi baru (R48)

Strategi Pengembangan Dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng sangat kaya dengan potensi unggulan daerah baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan serta potensi alam yang indah sebagai pusat destinasi pariwisata kelas dunia. Potensi daerah unggulan ini perlu digali dan dipetakan serta dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik melalui pengembangan sistem inovasi. Pemanfaatan potensi terbaik daerah Kabupaten Buleleng menjadi sangat penting, mengingat Kabupaten Buleleng masih dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya untuk mendorong pemajuan potensi setempatnya.

Strategi mendesak adalah dengan mengembangkan desa percontohan. Pemda Buleleng bermitra lembaga ditingkat desa dan perguruan-perguruan tinggi untuk memerankan diri sebagai PI UMKM. PI UMKM inilah mitra, sehingga kita bisa memberikan layanan kepada UMKM agar lebih inovatif melalui PI UMKM. Selanjutnya adalah mengajak desa/ kecamatan agar menjadi percontohan sambil mendorong program SIDA menjadi sebuah gerakan masif agar semua desa/kecamatan mau melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah masing-masing sesuai dengan potensi terbaik yang dimilikinya. Penataan SIDA harus dilakukan secara sistemik menyangkut kerangka kerja, hubungan kelembagaan iptek dan linkages antar berbagai pihak. Budaya inovasi juga harus didorong agar keunggulan-keunggulan daerah mampu berkembang sesuai dengan potensi terbaik yang dimiliki. Inovda Buleleng ini merupakan suatu tantangan karena Lembaga dituntut bukan lagi sekedar sebagai pengembang teknologi tetapi juga harus bisa membawa teknologi itu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk membantu stakeholder menentukan pilihan teknologi terbaik, membantu proses penerapannya, mengembangkan dan berinovasi. Pemda memfasilitasi program-program penguatan sistem inovasi bisa menjadi program payung bagi banyak pihak, karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh Inovda kalau semua pihak sudah menganggap ini sebagai program payung. Artinya akan ada langkah-

langkah konkrit untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan SIDA pada tataran operasional, termasuk dukungan sumber dana. Pengembangan Sistem Informasi Pusat Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menjadi sangat penting untuk bisa mendata, menyimpan dan mengolah inovasi yang di miliki Kabupaten Buleleng menjadi inovasi yang bisa bermanfaat secara lebih luas serta mampu meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng. Berikut ini adalah draft Sistem Informasi SIDA yang dapat dipertimbangkan untuk dipakai dalam pengembangan sistem inovasi di Kabupaten Buleleng.



Dengan adanya sistem informasi atau aplikasi SIDA, maka pemerintah Kabupaten Buleleng bisa mengecek progress ketercapaian SIDA dan membantu pemerintah membuat keputusan dalam meningkatkan inovasi daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil survey, wawancara dan FGD serta analisa dokumen-dokumen penting pemerintah Kabupaten Buleleng maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) SIDA Kabupaten Buleleng masih belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya beberapa PD yang belum memiliki inovasi dan beberapa OPD yang mengoptimalkan inovasi yang sejalan dengan roadmap SIDA yang telah disusun tahun 2017. Masyarakat melalui pemerintah desa telah menyampaikan aspirasi terkait inovasi yang diharapkan dari Kabupaten Buleleng.
- 2) Strategi kebijakan dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Buleleng adalah dengan meneruskan roadmap

yang telah disusun tim SIDA tahun 2017 yang masih relevan dan belum tercapai secara optimal serta mengakomodasi masukan-masukan yang diberikan oleh responden dan telah disusun dalam bentuk rencana aksi.

- 3) Strategi kelembagaan SIDA yang sekarang sudah bagus, dimana terkait penelitian dan inovasi ditangani oleh lembaga khusus yang berdiri sendiri seperti Balitbang Inovda Daerah. Dalam penataan jaringan, perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, LSM di nasional dan internasional untuk bisa menindaklanjuti hasil SIDA dengan lebih operasional dan memberi dampak yang luas baik secara ekonomi maupun secara sosial kepada masyarakat Buleleng.
- 4) Dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah Buleleng, terutama terkait dengan inovasi yang dikembangkan harus berbasis data kemudian dilanjutkan dengan teknologi sehingga inovasi daerah yg ada di Kabupaten Buleleng secara kelembagaan dikelola dengan satu sistem aplikasi.

Beberapa saran untuk pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hubungannya dengan penguatan sistem inovasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Buleleng disarankan untuk membuat satu aplikasi untuk menginventarisasi data inovasi yang ada di Kabupten Buleleng.
- 2) Balitbanginovda membantu mengidentifikasi inovasi apa saja yang bisa dikembangkan untuk bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan memberikan PAD bagi Kabupaten Buleleng
- 3) Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban dan dengan adanya kewajiban membuat laporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) maka inovasi yang dilaksanakan PD sangat penting untuk meningkatkan nilai IKM.
- 4) Kabupaten Buleleng perlu membuat desa percontohan untuk pengembangan inovasi yang bisa memotivasi desa-desa lain untuk mengembangkan hal yang sama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Buleleng
- 5) Kabupaten Buleleng menyediakan dana pendamping dan kemudian bekerjasama dengan perguruan tinggi di Bali untuk bisa mengakses pendanaan-pendanaan yang ada di level nasional dan internasional.
- 6) Pemerintah Kabupaten Buleleng melibatkan akademisi dari Undiksha maupun perguruan tinggi lainnya untuk pengembangan inovasi ke level scale up.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, SE., MT, I. (2019). Cover Depan. Jurnal Transportasi Multimoda, 16(1). <https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>
- Anggereni, N. W. E. S. (2019). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v10i2.20139>
- Arifin, M., Putera, P. B., Zulhamdani, M., Mulatsih, S., Indraprahasta, G. S., Asmara, A. Y., & Oktaviyanti, D. (2011). Analisis Kebijakan Inovasi di Daerah Mendukung Sistem Inovasi Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek): Studi Kasus Jawa Tengah dan Jawa Timur. In Analisis Kebijakan. Jakarta: LIPI Press.
- Asropi. (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi, 5(3), 246–255. Retrieved from <https://asropi.files.wordpress.com/2009/02/budaya-inovasi-dan-reformasi-birokrasi1.pdf>
- Aulia, P., Nurani, F., & Publik, A. (2019). Gaya Kepemimpinan Terhadap Lahirnya Inovasi Daerah (Studi pada Daerah Inovatif Versi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2019).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. (2017). Kabupaten Buleleng Dalam Angka Buleleng Regency in Figures 2017. In Buleleng.
- Camagni, R. (2002). On The Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? In ERSA conference papers (p. 518). Dortmund: European Regional Science Association. Retrieved from <http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa02/cd-rom/papers/518.pdf>
- Cooke, P., Uranga, M. G., & Etxebarria, G. (1997). Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions. Research Policy, 26(4–5), 475–491. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(97\)00025-5](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00025-5)
- Dewi, K. A. C. J. (2019, December). Aspek Kelayakan Finansial Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Di Kelompok Tani Ternak Swaka Mitra, Desa Banjar Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 160-166).
- Doni, S., & Prasetyo, A. (2021). Pengembangan Kawasan Ekowisata Dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kabupaten Labuhanbatu Melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(2), 159-174.
- Feisal, T. (2006). Manajemen Teknologi Untuk Pembangunan Daerah: Upaya Memperkuat Sistem Kelembagaan Iptek Daerah. In Analisis Sistem (Tahun III, pp. 53–6). Jakarta: Perpustakaan Bioteknologi LIPI.
- Geertz, C. (1966). The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man. Bulletin of the Atomic Scientists, 22(4), 2–8. <https://doi.org/10.1080/00963402.1966.11454918>
- Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. In The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973). In Basic Books, Inc. (pp. 310–323). <https://philpapers.org/archive/geettd.pdf>.
- Gie, K. K. (1995). Analisis ekonomi politik Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.
- Hadiyati, E. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 13(1). Retrieved from <https://www.scribd.com/document/358890685/Kreativitas-dan-Inovasi-Berpengaruh-Terhadap-Kewirausahaan-Usaha-Kecil-pdf>

- Ismiatun. (2015). Pengembangan Sistem Inovasi Dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Pendekatan System Dynamics. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 2442–6962. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/42437-ID-pengembangan-sistem-inovasi-dalam-perspektif-peningkatan-daya-saing-daerahdenga.pdf>
- Kartika, R. S. (2017). Local Government Readiness in Developing SIDA Roadmap in Banten, West Sumatera, and Bali. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 9(1), 127–136.
- Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2020" (pdf). www.bulelengkab.bps.go.id. hlm. 88. Diakses tanggal 19 Januari 2021.
- Kementerian Dalam Negeri Indonesia. (2017). Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Internet Archive, 28–36. <https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/33>. Jawa Tengah fix/page/n27/mode/2up
- Kesumadewi, A. A. I., Susila, I. W., Gunadi, G. A., Sarjana, D. G. R., Diara, I. W., & Wiryana, G. N. A. S. (2020). Identifikasi potensi dan pengembangan sistem pertanian organik menuju Bali pulau organik. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 221–252.
- Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3), 569–586. Retrieved from <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.
- Luttikhuis, B. (2013). Beyond race: Constructions of Europeanness in late-colonial legal practice in the Dutch East Indies. *European Review of History*, 20(4), 539–558. <https://doi.org/10.1080/13507486.2013.764845>
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. G. D. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 253–276.
- Narutomo, T. (2014). Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). *Jurnal Bina Praja*, 6(2). Retrieved from <http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/view/49/46>
- Negara, I. K. W., Wijayanti, N. P. P., Pratiwi, M. A., & Suryawirawan, I. G. W. (2020). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Strategi Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap Di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Social Economic Condition of Coastal Communities and Development Strategy of Capture Fisheries Potentials in Buleleng Regency). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 27(2), 88–92.
- Paramarta, I. K. A. (2013). Sistem Informasi Geografis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Berbasis Web. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 2(3), 243. <https://doi.org/10.23887/janapati.v2i3.9812>
- Pebriani, D. A. A., Saraswati, S. A., Negara, K. W., Pratiwi, M. A., & Wijayanti, N. P. P. (2018). Pelatihan Pembuatan Bakso Rumput Laut Sebagai Inovasi Pangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat Desa Patas, Kabupaten Buleleng. *Buletin Udayana Mengabdi*, 17(4).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 05-12-2018.

- Putera, P. B. (2012). Policy Review atas Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dalam Kerangka Sistem Inovasi (perbandingan Isi Kebijakan Nasional Brazil Indonesia, dan Kebijakan Daerah Jawa Timur-Sumatera Selatan). Universitas Indonesia.
- Putra, I. W. W. I. (2019). Analisis Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2019. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(2), 91-96.
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 641-647. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/79007-ID-sinergitasstakeholders-dalam-inovasi-da.pdf>
- Risandewi, T. (2017). Implementasi dan Capaian SIDA di Kabupaten Blora Tahun 2012-2015. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(3), 153-164.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141. <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>
- Taufik, T. A. (2005). Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Pengembangan_sistem_inovasi_daerah.html?id=dJeunrpWYWAC&redir_esc=y
- Werastuti, D. N. S., & Wahyuni, D. S. (2016). Sistem Informasi Berbasis Web 2.0 Produk Unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng. *Semin. Nas. Ris. Inov*, 4(1), 49-58.
- Wirasuta, I. M. A. G. (2019). Transformasi Bidang Litbang Menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(3), 107-118.
- Wiryawan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Julianti, L. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. *Jurnal Advokasi*, 8(1).
- Yudasmaras, G. A. (2017). Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Buleleng Melalui Pengembangan Mina Wisata Bahari (Management of Buleleng Coastal Areas Through the Marine Fisheries Tourism Development). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(3), 381-389.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng

Alamat : Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja-Bali

Telepon/Fax : (0362)-24457

Email : balitbang@bulelengkab.go.id

Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id>

<http://ejurnal.bulelengkab.go.id>

ISSN 2963-6477

